

**PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PANTAI DALAM
PENINGKATAN PAD KABUPATEN
BANGGAI LAUT**

Disusun Oleh:

SITI FAZRYANTI RAHMAD

NIM: 4519011002



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Pengembangan Objek Wisata Pantai Dalam Peningkatan
PAD Kabupaten Banggai Laut

Nama Mahasiswa : Siti Fazryanti Rahmad

Stambuk/NIM : 4519011002

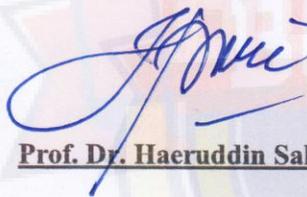
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

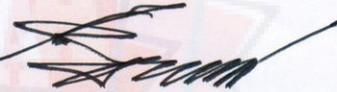
Telah Disetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Haeruddin Saleh, SE., M.Si

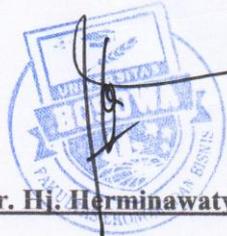


Dr. Thamrin Abduh, SE., M.Si

Mengetahui Dan Mengesahkan:

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

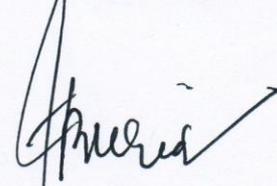
**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bosowa**



Dr. Hj. Herminawaty Abubakar, SE., MM.

Tanggal Pengesahan:

**Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan**



H.M. Idris, SE., M.Si

PERNYATAAN KOERSINILAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Fazryanti Rahmad

NIM : 4519011002

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Judul : Pengembangan Objek Wisata Pantai Dalam Peningkatan
PAD Kabupaten Banggai Laut.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah asli saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa dapat paksaan sama sekali dari pihak lain.

Makassar, 22 Juni 2023

Mahasiswa yang bersangkutan



Siti Fazryanti Rahmad

PRAKATA

Bismillahir rahmanir rahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengembangan Objek Wisata Pantai Dalam Peningkatan PAD Kabupaten Banggai Laut”. Shalawat serta salam penulis tunjukan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang memberikan banyak contoh teladan bagi kemaslahatan umat manusia.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan berupa bimbingan, dorongan, doa, tenaga, ide-ide, maupun pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah banyak memberikan hikmat dan rahmatnya dalam menyelesaikan tugas akhir penulis.
2. Teristimewa kedua Orang Tua Tercinta, Ayahanda Alm.Purn Sertu Rahmad dan Ibunda Nurmin Hi. Fattah Saida merupakan orang paling berjasa dalam kehidupan penulis yang setiap saat dengan cucuran keringatnya dan dalam setiap hembusan napasnya selalu mendoakan penulis, selalu sabar mendidik, membimbing dan membesarkan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang.
3. Ibu Dr. Hj. Herminawaty Abubakar, SE.,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

4. H.M. Idris, SE.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi pembangunan Universitas Bosowa dan segenap dosen serta staff Fakultas Ekonomi yang sangat berjasa menambah ilmu pengetahuan dan banyak membantu penulis selama menyelesaikan studi di Universitas Bosowa.
5. Bapak Prof. Dr. Haeruddin Saleh, SE., M.Si. dan Dr. Thamrin Abduh, SE., M.Si selaku pembimbing I dan pembimbing II yang dengan penuh kesabaran, disela kesibukannya masih meluangkan waktu dan memberikan masukan, arahan, dan petunjuk yang sangat berarti bagi penulis.
6. Bapak Laode Kaimudin, SE. selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai laut yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
7. Seluruh pegawai dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Banggai Laut yang telah banyak membantu penulis dalam memperoleh informasi dan data yang penulis butuhkan pada penelitian ini.
8. Adikku Tersayang, Mardianto Rahmad yang telah memberikan semangat dan dukungan tiada henti-hentinya.
9. Kepada Prada Sulfian, Sebagai Partner saya, yang sudah menjadi pendamping saya dalam segala hal, Terima kasih Atas dukungan, semangat, serta telah menjadi tempat berkeluh kesah, dan selalu ada suka maupun duka dari awal hingga proses penyusunan skripsi ini.
10. Kepada wanita Manjalita saya, Fatur Rahma dan Yulia Anggraini Mappa yang telah membantu penulis dan memberikan semangat dalam penulisan skripsi.

11. Sahabatku anak KKN-T 53 Desa Gattareng Matinggi yang sudah menjadi seperti saudara kandung yang selalu ada dengan berbagai suka duka dan selalu mendukung disetiap pengerjaan skripsi.
12. Untuk Syafirah Anwar, Una Novalely, Pebriani Herma, Terima kasih sudah mewarnai penghujung perkuliahan penulis, dan juga membantu saling support satu sama lain dan memberikan dorongan kepada penulis untuk terus berjuang menyelesaikan skripsi
13. Seluruh Kakak-Kakak, adik-adik dan teman-teman organisasi paguyuban yang telah memberikan banyak warna selama masa perkuliahan serta menjadi rumah diluar bangku perkuliahan.
14. Seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2019 Universitas Bosowa khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menjadi keluarga baru untuk penulis selama berproses di Universitas Bosowa.
15. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat yang penulis tidak dapat sebutkan satu-persatu, terima kasih atas semua bantuan dan do'anya. Kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan kepada penulis tidak akan pernah penulis lupakan, semoga segala bantuan yang tidak ternilai harganya ini mendapat imbalan di sisi Allah SWT sebagai amal ibadah. Aamiin.
16. *And The Last*, kepada diri saya sendiri Siti Fazryanti Rahmad terima kasih telah bertahan, berproses dan mampu berjuang sejauh ini. Aku tau ini tidak mudah menjalaninya sendiri *but see now! You did it Anthy!!!*

Akhir kata penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak

sangat penulis harapkan demi perbaikan-perbaikan ke depan. Semoga Allah SWT ridho atas skripsi ini sehingga bisa bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Makassar, 22 Juni 2023

Penulis



ABSTRAK

SITI FAZRYANTI RAHMAD. 2023. Skripsi. “Pengembangan Objek Wisata Pantai Dalam Peningkatan PAD Kabupaten Banggai Laut”, dibawah bimbingan Prof. Dr. Haeruddin Saleh, SE.,M.Si sebagai Pembimbing Skripsi I dan Dr. Thamrin Abduh, SE., M.Si. sebagai pembimbing Skripsi II.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi pengembangan objek wisata pantai di Kabupaten Banggai laut dan mendeskripsikan kontribusi objek wisata pantai dalam meningkatkan PAD Kabupaten Banggai laut.

Pada dasarnya tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu sebuah penelitian yang berusaha memberikan gambaran mengenai objek yang diteliti yang bertujuan membuat deskriptif atau gambaran secara sistematis dan aktual mengenai fakta-fakta yang ada. Pemilihan informan dilakukan dengan cara purposive sampling yaitu; penarikan informan yang dilakukan secara sengaja dengan kriteria tertentu. Adapun subyek penelitian ini berjumlah 5 orang Yaitu orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Banggai Laut adalah sebagai berikut: a. Melakukan koordinasi dengan pelaku usaha pariwisata. b. Melakukan pengembangan destinasi pariwisata. c. Melakukan pemasaran pariwisata. d. Melakukan kerjasama dengan lembaga kepariwisataan. 2) Kontribusi pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Banggai Laut melalui beberapa pos, yaitu: a. Pajak hotel. b. Pajak restoran. c. Pajak hiburan. d. Retribusi tempat khusus parkir.

Kata Kunci: Pengembangan Objek Wisata Pantai, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

SITI FAZRYANTI RAHMAD. 2023. Thesis. "Development of Beach Tourism Objects in Increasing PAD of Banggai Laut Regency", under the guidance of Prof. Dr. Haeruddin Saleh, SE., M.Si as Thesis Advisor I and Dr. Thamrin Abduh, SE., M.Sc. as Thesis Advisor II.

This study aims to determine and describe the strategy for developing beach tourism objects in Banggai Laut Regency and describe the contribution of beach tourism objects in increasing PAD in Banggai Laut Regency.

Basically the type of research used is descriptive, namely a study that seeks to provide an overview of the object under study which aims to make a descriptive or systematic and actual description of the facts. The selection of informants was carried out by means of purposive sampling namely; withdrawal of informants that are done deliberately with certain criteria. The subjects of this study amounted to 5 people, namely people or actors who really know and master the problem, and are directly involved with the research problem. Data collection techniques in this study used observation, interviews, documentation.

The results of the research show that 1) The tourism development strategy in Banggai Laut Regency is as follows: a. Coordinate with tourism business actors. b. Developing tourism destinations. c. Doing tourism marketing. d. Collaborating with tourism agencies. 2) The contribution of tourism in increasing local revenue (PAD) of Banggai Laut Regency through several posts, namely: a. Hotel tax. b. Restaurant tax. c. Entertainment tax. d. Parking fees for special places.

Keywords: *Coastal Tourism Object Development, Regional Original Income*

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KOERSINILAN	iii
PRAKATA	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penulisan.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori.....	10
1. Pendapat Asli Daerah	10
2. Objek Wisata	20
B. Penelitian Terdahulu	30
C. Sintesis teori dan Hasil penelitian	33

D. Kerangka Konseptual	34
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Fokus dan Deskripsi fokus	37
D. Informan Penelitian.....	38
E. Jenis dan Sumber Data	38
F. Teknik Pengumpulan Data.....	40
G. Teknik Analisis Data.....	41
H. Rencana Pengujian Keabsahan Data.....	42
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Objek Penelitian	53
B. Penyajian Data Dan Analisis.....	58
1. Strategi Pengembangan Objek Wisata Pantai	59
2. Kontribusi Pariwisata Terhadap (PAD).....	74
C. Pembahasan Temuan.....	76
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu	30
Tabel 4.1 : Daftar Objek Wisata Pantai Kabupaten Banggai Laut.....	57
Tabel 4.2 : Kontribusi Ekonomi Sektor Pariwisata Tahun 2022	74
Tabel 4.3 : Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap (PAD) 3 Tahun Terakhir.....	75
Tabel 4.4 : Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap (PAD) Di Kab. Balut	82
Tabel 4.5 : Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap (PAD) Di Kab.Bangkep	82



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kerangka Konseptual	35
Gambar 3.1 : Skema Analisis Data	42
Gambar 4.1 : Denah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.....	54
Gambar 4.2 : Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.....	55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki keindahan alam dan keanekaragaman budaya, sehingga perlu adanya peningkatan sektor pariwisata. Hal ini dikarenakan Indonesia secara geografis terletak diantara benua Australia dan Asia, serta di antara samudera Hindia dan samudera Pasifik. Sedangkan secara astronomis, Indonesia terletak di 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BT sampai 141 derajat BT. Potensi pariwisata Indonesia yang berupa 17.508 pulau-pulau yang terbentang sejauh 5.120 km dengan iklim tropis sejuk baik di darat maupun di pantai dan laut (Prasetya, 2018).

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang sedang serius digarap oleh negara Indonesia dalam rangka mendorong perekonomian nasional. Indonesia memiliki potensi pariwisata yang besar karena Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang luas, yang wilayahnya membentang dari Sabang sampai Marauke. Pariwisata merupakan salah satu fenomena sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi, sehingga keadaan ini menjadi sebuah perhatian yang besar dari para ahli dan perencana pembangunan. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk juga perusahaan obyek serta daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut (Bahiyah et al., 2018).

Sektor pariwisata adalah sektor yang yang bisa menjadi alternatif pengembangan ekonomi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, pariwisata diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha serta mampu menghadapi tantangan perubahan lokal, nasional, dan global. Pentingnya peranan pariwisata dalam pembangunan ekonomi di berbagai negara sudah tidak diragukan lagi. Pariwisata yang merupakan suatu industri dalam perkembangan sektor-sektor industri kecil lainnya (Nomor, 10 C.E.).

Pembangunan pariwisata suatu daerah akan memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Dampak tersebut akan mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi penduduk yang berada di sekitar obyek wisata baik kondisi fisik maupun kehidupan sosial ekonominya (Kurniawan, 2019). Di Indonesia, pengelolaan Kepariwisataaan dikelola oleh pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pengelolaan Community Based Tourism (CBT) adalah menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan kepariwisataan, sehingga kemaanfaatan kepariwisaataan sebesar-besarnya diperuntukan bagi masyarakat, dimana masyarakat secara bersama-sama membangun dan mengelola wisata (Dartiningsih, 2021).

Menurut Ade (2021), wisatawan adalah orang-orang yang melakukan perjalanan sementara waktu ke tempat atau daerah yang sama sekali masih asing baginya. Olehnya karena itu sebelum orang wisatawan melakukan perjalanan wisatanya, terlebih dahulu kita menyediakan prasarana dan sarana pariwisata sebagai berikut: Fasilitas transportasi, Fasilitas akomodasi,

Fasilitas Catering service, Obyek dan atraksi wisata, Aktivitas rekreasi, Fasilitas pembelanjaan, Rumah Makan dan Hotel atau Penginapan. supaya pengunjung dapat nyaman dan merasa tertarik di saat melakukan kunjungan wisata. Dengan demikian setiap daerah Pariwisata harus dapat menyediakan sarana dan prasarana agar membuat calon Wisatawan tertarik mendatangi kawasan Pariwisata tersebut.

Ekonomi pariwisata adalah kegiatan yang berhubungan dengan fenomena pariwisata untuk memaksimalkan pengunjung yang akan berdampak kepada pendapatan pengelola Wisata Mantar. Adapun kendala-kendala yang di hadapi dalam meningkatkan pengunjung yang berdampak kepada pendapatan, masih kurangnya Sumber Daya Manusia, dan kurang memahami teknologi, serta kesadaran terhadap menjaga kelestarian lingkungan Wisata (Ade, 2021).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Penyerahan pengelolaan pemerintahan dan pembangunan kepada daerah kota maupun kabupaten disertai juga dengan pemberian kewenangan dalam mencari sumber pembiayaan dalam melaksanakan pengelolaan tersebut. Sumber pembiayaan tersebut diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), bantuan pemerintah pusat, dan sumber-sumber lain yang sah (Sunarso & SH, 2023).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah. Berdasarkan pada potensi yang dimiliki masing-masing daerah, peningkatan dalam penerimaan PAD ini akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Seiring dengan perkembangan

perekonomian daerah yang semakin terintegrasi dengan perekonomian nasional dan internasional, maka kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan PAD menjadi sangat penting (Nasir, 2019).

PAD merupakan gambaran potensi keuangan daerah yang pada umumnya mengandalkan usur pajak daerah dan retribusi daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat berbagai sektor yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, diantaranya adalah: sektor perdagangan, sektor jasa, sektor pertanian, sektor pariwisata dan lain-lain (Sa'idah, 2017).

Di era globalisasi saat ini, sektor pariwisata akan menjadi pendorong utama perekonomian dunia dan menjadi industri yang mengglobal. Pariwisata akan memberikan banyak pemasukan bagi daerah yang sadar akan potensinya terhadap sektor pariwisata. (Ismayanti, 2000). Berkembangnya pariwisata di suatu daerah akan mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat, yakni secara ekonomis, sosial dan budaya. Namun, jika pengembangannya tidak dipersiapkan dan dikelola dengan baik, justru akan menimbulkan berbagai permasalahan yang menyulitkan atau bahkan merugikan masyarakat (Setya Nugraha, 2017).

Banggai Laut merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kepulauan yang beribukotakan di Salakan. Memisahkan diri dari suatu daerah berarti daerah tersebut dianggap sudah bisa mandiri dalam mengelola daerahnya sendiri atau dalam bahasa pemerintahan dinamakan dengan otonomi daerah. Oleh karena itu Mandiri dalam hal ini yakni dalam hal administrasi,

pemerintahan, pembangunan, bahkan perekonomian. Untuk bisa memajukan daerah tersebut maka sektor yang tentu mempunyai peran adalah sektor perekonomian, dimana daerah harus mampu mencari pendapatan-pendapatan yang berasal dari daerah tersebut. Inilah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sektor yang mereka lirik untuk menunjang akan hal tersebut adalah Sektor Wisata (Babo, 2016).

Wilayah Kabupaten Banggai Laut memiliki potensi besar dalam pengembangan kepariwisataan. Sebagai kabupaten kepulauan, pesisir dan laut menjadi sumber daya pariwisata andalan. Keindahan pantai dengan hamparan pasir putih, pulau-pulau kecil dan geologi bawah laut yang merupakan bagian dari segitiga karang dunia menjadikan perairan Kabupaten Banggai Laut dihuni beragam terumbu karang dan biota bawah laut, yang sangat beragam juga endemik antara lain ikan Banggai Cardinal Fish (BCF), dan Burung Mas (nikobar pigeon), Selain itu, keberadaan danau dengan spesies ubur-ubur yang tidak beracun menjadikan Banggai Laut sebagai salah satu destinasi wisata yang sangat potensial untuk dikembangkan (Mappa, 2022).

Salah satu aspek penting dalam upaya peningkatan kinerja pemerintah daerah khususnya dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Banggai Laut adalah mewujudkan Sapta Pesona melalui kebijakan pembangunan pariwisata dan budaya daerah yang demokratis, partisipatif dan berkelanjutan. Hal ini didukung oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan yang menyebutkan bahwa pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan azas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan,

kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan dan kesatuan (Halimu, 2022).

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Banggai Laut, yang diuraikan dalam Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 34 Tahun 2017 tentang uraian tugas, fungsi dan tata kerja dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Banggai Laut yang menyatakan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dinas adalah di bidang pariwisata dan kebudayaan (Halimu, 2022).

Kabupaten Banggai Laut mempunyai 10 objek wisata bahari. Berbicara sektor wisata sesuai dengan namanya Banggai Laut kaya akan potensi-potensi wisata yang sangat luar biasa khususnya dalam hal ini adalah wisata pantai. Namun yang menjadi permasalahannya adalah Potensi-potensi ini kebanyakan masih banyak yang belum terkelola dengan baik, seperti yang ada di Desa Kelapa Lima. Tempat wisata yang satu ini sering menjadi tempat favorit orang-orang baik dari dalam daerah maupun daerah untuk menghabiskan akhir pekan atau hari libur mereka, karena pantai ini mempunyai keindahan pasir putih yang begitu menarik, ombak yang begitu indah, serta suasana pepohonan alam sekitar yang membuat hati ini begitu nyaman. Menanggapi permasalahan ini Pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 12 ayat 3c yang mengatakan salah satu urusan Pemerintahan pilihan adalah Pariwisata, maka Pemerintah Daerah membuat yang namanya Dinas yang mempunyai kewenangannya untuk bisa mengelola potensi-potensi wisata ini, maka tepat pada tahun 2014

dikeluarkanlah Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Dinas Daerah Kabupaten Banggai Laut dalam pasal 2i dimana dinas daerah terdiri dari (i) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan secara resmi orang-orang yang mengisi bagian-bagian dalam dinas ini disahkan dalam Peraturan Bupati nomor 20 Tahun 2015 tepat pada tanggal 19 Maret 2015 (Babo, 2016).

Berdasarkan pemikiran tersebut diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Pengembangan Objek Wisata Pantai Dalam Peningkatan PAD Kabupaten Banggai Laut”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Strategi Pengembangan objek wisata pantai di Kabupaten Banggai laut?

Bagaimana Kontribusi objek wisata pantai Dalam Meningkatkan PAD Banggai laut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi pengembangan objek wisata pantai di Kabupaten Banggai laut.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kontribusi objek wisata pantai dalam meningkatkan PAD Kabupaten Banggai laut.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan dan wawasan kepada penulis berkaitan dengan masalah yang diteliti dan membandingkan teori dengan praktek yang berada di perusahaan mengenai Pengembangan Objek Wisata Pantai Dalam Peningkatan PAD Kabupaten Banggai Laut.

2. Bagi Instansi.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan untuk mengetahui sejauh mana dari pelaksanaan program Pengembangan Objek Wisata Pantai Dalam Peningkatan PAD Kabupaten Banggai Laut.

3. Bagi Almamater.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi ataupun sebagai data pembanding sesuai dengan bidang yang akan diteliti, memberikan sumbangan pemikiran, menambah wawasan pengetahuan serta memberikan bukti empiris dari penelitian-penelitian sebelumnya mengenai Pengembangan Objek Wisata Pantai Dalam Peningkatan PAD Kabupaten Banggai Laut.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Bersumber pada judul di atas penulis hendak membagikan lingkup penelitian supaya tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pengertian ataupun

multitafsir dalam menguasai riset ini, hingga penulis membagikan defenisi arti dari judul tersebut lewat penjelasan berikut ini:

1. Pengembangan adalah peningkatan tingkat dan kualitas hidup penduduk, dan penciptaan atau perluasan pendapatan daerah setempat dan peluang kerja, tanpa merusak sumber daya lingkungan.
2. Objek Wisata adalah tempat yang dikunjungi dengan berbagai keindahan yang didapatkan, tempat untuk melakukan kegiatan pariwisata, tempat untuk bersenang-senang dengan waktu yang cukup lama demi mendapatkan kepuasan, pelayanan yang baik, serta kenangan yang indah di tempat wisata.
3. Pantai adalah daerah yang terletak di atas dan di bawah permukaan daratan yang dimulai dari batas garis pasang laut tertinggi.
4. PAD adalah segenap pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk keperluan daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang tertuang dalam pasal 1 butir 15 UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, pendapatan asli daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain - lain yang sah.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah.

Dari ketentuan pasal tersebut di atas, maka pendapatan daerah dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu:

- 1) Pendapatan asli daerah
- 2) Pendapatan non asli daerah

Sampai saat ini yang termasuk Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri dan didapat melalui

pajak daerah, retribusi daerah, BUMD dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

b. Hasil pajak daerah

Pajak Daerah yang selanjutnya di sebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Mardiasmo:2018). Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasa tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.

Pasal 2 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak kabupaten atau kota terdiri dari:

- 1) Pajak hotel
- 2) Pajak restoran
- 3) Pajak hiburan
- 4) Pajak reklame
- 5) Pajak penerangan jalan
- 6) Pajak mineral
- 7) Pajak parker
- 8) Pajak air dan tanah
- 9) Pajak bumi dan bangunan.
- 10) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Jenis Pajak tersebut dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Adapun penjelasan dari ketujuh jenis pajak kabupaten atau kota sebagai berikut:

1) Pajak Hotel

Pajak Hotel merupakan dana/iuran yang dipungut atas penyedia jasa penginapan yang disediakan sebuah badan usaha tertentu yang jumlah ruang/kamarnya lebih dari 10. Pajak tersebut dikenakan atas fasilitas yang disediakan oleh hotel tersebut. Tarif pajak hotel dikenakan sebesar 10% dari jumlah yang harus dibayarkan kepada hotel dan masa pajak hotel adalah 1 bulan.

2) Pajak Restoran

Pajak Restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Tarif pajak restoran sebesar 10% dari biaya pelayanan yang ada diberikan sebuah restoran

3) Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan atas jasa pelayanan hiburan yang memiliki biaya atau ada pemungutan biaya di dalamnya. Objek pajak hiburan adalah yang menyelenggarakan hiburan tersebut, sedangkan subjeknya adalah mereka yang menikmati hiburan tersebut. Kisaran tarif untuk pajak hiburan ini adalah 0%-35% tergantung dari jenis hiburan yang dinikmati.

4) Pajak Reklame

Pajak Reklame merupakan pajak yang diambil/dipungut atas benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial agar menarik perhatian umum. Biasanya reklame ini meliputi papan, billboard, reklame kain, dan lain sebagainya. Namun, ada pengecualian pemungutan pajak untuk reklame seperti reklame dari pemerintah, reklame melalui internet, televisi, koran, dan lain sebagainya. Tarif untuk pajak reklame ini adalah 25% dari nilai sewa reklame yang bersangkutan.

5) Pajak Penerangan jalan

Objek dari pajak ini adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Besaran pajak paling tinggi sebesar 10% dari nilai jual tenaga listrik. Untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 3%. Sedangkan untuk penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5%.

6) Pajak Mineral

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral yang bukan logam seperti asbes, batu kapur, batu apung, granit, dan lain sebagainya. Namun, pajak tidak akan berlaku jika dilakukan secara komersial. Tarif untuk mineral bukan logam sebesar 25%, sedangkan tarif untuk batuan sebesar 20%.

7) Pajak Parkir

Pajak Parkir merupakan pajak yang dipungut atas pembuatan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha atau sebagai sebuah usaha/penitipan kendaraan. Lahan parkir yang dikenakan pajak adalah lahan yang kapasitasnya bisa menampung lebih dari 10 kendaraan roda 4 atau lebih dari 20 kendaraan roda 2. Tarif pajak yang dikenakan sebesar 20%

8) Pajak air dan tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan air tanah untuk tujuan komersil. Besar tarif Pajak Air tanah adalah 20%.

9) Pajak bumi dan bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, atau dimanfaatkan.

10) BEA perolehan hak dan bangunan

Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu, misalnya melalui transaksi jual - beli, tukar-menukar, hibah, waris, dll. Tarif dari pajak ini sebesar 5% dari nilai bangunan atau tanah yang diperoleh orang pribadi atau suatu badan tertentu.

Nick Devas berpendapat bahwa tolak ukur untuk menilai pajak daerah sebagai berikut:

- 1) Hasil (*yield*) : memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitan dengan berbagai layanan yang dibiayainya; stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil itu; dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi; pertumbuhan penduduk; dan sebagainya; juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.
- 2) Keadilan (*equity*) : dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang; pajak bersangkutan harus adil secara horisontal, artinya beban pajak haruslah sama benar antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama; harus adil secara vertikal, artinya kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar memberikan sumbangan yang lebih besar daripada kelompok yang tidak banyak memiliki sumberdaya ekonomi; dan pajak itu haruslah adil dari tempat ketempat, dalam arti hendaknya tidak ada perbedaan - perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari satu daerah kedaerah yang lain, kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat.
- 3) Daya guna ekonomi (*economic efficiency*) : pajak hendaknya mendorong atau setidaknya tidak menghambat penggunaan sumberdaya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi; mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung; dan memperkecil “beban lebih”

- 4) Kemampuan melaksanakan (*ability to implement*) : suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha
- 5) Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*suitability as a local revenues source*): ini berarti, haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak; tidak mudah dihindari; dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain; pajak daerah jangan hendaknya mempertajam perbedaan-perbedaan antara daerah, dari segi potensi ekonomi masing-masing dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah

c. Hasil Retribusi Daerah

Selain pajak daerah, sumber pendapatan daerah dapat diperoleh melalui retribusi. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi berbagai persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar merupakan pungutan yang sifatnya budgetnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah

dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

d. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut Halim dan Kusufi (2012) hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Jenis hasil pengelolaan kekayaan yang diisahkan menurut Nurlan Darise (2009) antara lain sebagai berikut:

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN.
- 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Penerimaan PAD lainnya yang menduduki peran penting setelah pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian Pemerintah Daerah atas laba BUMD. Tujuan didirikannya BUMD adalah dalam rangka menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, BUMD merupakan cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Jenis pendapatan yang termasuk hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain laba, dividen, dan penjualan saham milik daerah. Kekayaan daerah yang dipisahkan

berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri, dalam hal ini hasil laba perusahaan daerah merupakan salah satu daripada pendapatan daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, maka sewajarnya daerah dapat pula mendirikan perusahaan yang khusus dimaksudkan untuk menambah penghasilan daerah disamping tujuan utama untuk mempertinggi produksi, yang semua kegiatan dititikberatkan kearah pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya serta ketentraman dan kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur.

e. Lain – lain usaha daerah yang sah

Lain-lain pendapatan yang sah ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Transaksi ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut diatas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut : hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan pengadaan barang dan jasa oleh daerah, penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan,

Selain jenis-jenis PAD diatas, pendapatan daerah dapat pula berasal dari lain- lain PAD yang sah, seperti:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- 2) Jasa giro atas penyimpanan uang APBD pada sebuah bank pemerintah;
- 3) Pendapatan bunga;
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

Administrasi keuangan daerah PAD adalah pendapatan daerah yang diurus dan diusahakan sendiri oleh daerah yang dimaksud sebagai sumber PAD guna pembangunan. Berdasarkan ketentuan maka PAD dapat disimpulkan bahwa PAD merupakan sumber pendekatan daerah dengan mengelola dan memanfaatkan potensial daerahnya dan dalam mengelola, mengolah dan memanfaatkan potensi daerah, PAD dapat berupa pemungutan pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Objek Wisata

a. Pengertian Objek Wisata

Objek wisata adalah segala sesuatu yang ada di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang-orang ingin datang berkunjung ke tempat tersebut.

Pariwisata adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan wisata, termasuk objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata. Menurut Cooper dkk

dalam Sunaryo (2013) menjelaskan bahwa kerangka pengembangan destinasi pariwisata yaitu:

- 1) Obyek daya tarik wisata (*Attraction*) yang mencakup keunikan dan daya tarik berbasis alam, budaya, maupun buatan/*artificial*.
- 2) Aksesibilitas (*Accessibility*) yang mencakup kemudahan sarana dan sistem transportasi.
- 3) Amenitas (*Amenities*) yang mencakup fasilitas penunjang dan pendukung wisata.
- 4) Fasilitas umum (*Ancillary Service*) yang mendukung kegiatan pariwisata.
- 5) Kelembagaan (*Institutions*) yang memiliki kewenangan, tanggung jawab dan peran dalam mendukung terlaksananya kegiatan pariwisata.

b. Aspek 4A

yaitu *Attraction, Accessibility, Amenities, Ancillary Service*, yakni

1) *Attraction*

Menurut Suwena (2010), atraksi atau obyek daya tarik wisata (ODTW) merupakan komponen yang signifikan dalam menarik kedatangan wisatawan. Hal yang dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata disebut dengan modal atau sumber kepariwisataan (*tourism resources*). Modal atraksi yang menarik kedatangan wisatawan ada tiga, yaitu 1) Natural Resources (alami) seperti gunung, danau, pantai dan bukit; 2) atraksi wisata budaya seperti arsitektur rumah tradisional di desa, situs arkeologi, seni

dan kerajinan, ritual, festival, kehidupan masyarakat sehari-hari, keramahtamahan, makanan; dan 3) atraksi buatan seperti acara olahraga, berbelanja, pameran, konferensi dan lain-lain. Modal kepariwisataan menurut Suwena (2010: 89) dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata di tempat modal wisata ditemukan (*in situ*) dan di luar tempatnya yang asli (*ex situ*). Atraksi wisata dibedakan lagi menjadi atraksi penahan dan atraksi penangkap wisatawan.

2) *Accessibility*

Menurut Sunaryo (2013), aksesibilitas pariwisata dimaksudkan sebagai “segenap sarana yang memberikan kemudahan kepada wisatawan untuk mencapai suatu destinasi maupun tujuan wisata terkait”. Menurut French dalam Sunaryo (2013) menyebutkan faktor-faktor yang penting dan terkait dengan aspek aksesibilitas wisata meliputi petunjuk arah, bandara, terminal, waktu yang dibutuhkan, biaya perjalanan, frekuensi transportasi menuju lokasi wisata dan perangkat lainnya.

3) *Amenities*

Sugiama (2011) menjelaskan bahwa amenities meliputi “serangkaian fasilitas untuk memenuhi kebutuhan akomodasi (tempat penginapan), penyediaan makanan dan minuman, tempat hiburan (*entertainment*), tempat-tempat perbelanjaan (*retailing*) dan layanan lainnya”. French dalam Sunaryo (2013) memberikan batasan bahwa amenities bukan merupakan daya tarik bagi

wisatawan, namun dengan kurangnya amenities akan menjadikan wisatawan menghindari destinasi tertentu.

4) *Ancillary Service*

Sunaryo (2013) menjelaskan ancillary service lebih kepada ketersediaan sarana dan fasilitas umum yang digunakan oleh wisatawan yang juga mendukung terselenggaranya kegiatan wisata seperti bank, ATM, telekomunikasi, rumah sakit dan sebagainya. Sedangkan Sugiama (2011) menjelaskan bahwa *ancillary service* mencakup keberadaan berbagai organisasi untuk memfasilitasi dan mendorong pengembangan serta pemasaran kepariwisataan destinasi bersangkutan.

c. Kelembagaan Pariwisata

Kelembagaan kepariwisataan dijelaskan dalam UU tentang Kepariwisataan nomor 10 tahun 2009 sebagai “keseluruhan institusi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, mekanisme operasional serta regulasi yang terkait dengan kepariwisataan”. Sunaryo (2013) menjelaskan peran dan fungsi dari komponen pelaku usaha maupun pemangku kepentingan pengembangan kepariwisataan sebagai berikut:

1) Pemerintah Pusat maupun Daerah

Peran pemerintah di Indonesia disamping berfungsi utama sebagai regulator dalam menentukan norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan kepariwisataan, juga masih terlibat secara langsung dalam manajemen pengembangan kepariwisataan. Selain

itu peran pemerintah adalah sebagai fasilitator dalam program promosi dan pemasaran kepariwisataan nasional serta pengembangan Destinasi Pariwisata pada tingkat Nasional (DPN), Kawasan Strategis Pariwisata tingkat Nasional (KSPN) maupun Kawasan Khusus Pariwisata Nasional (KPPN). Pemerintah daerah Provinsi mempunyai fungsi melaksanakan tugas pembantuan untuk melakukan promosi dan pemasaran kepariwisataan provinsi. Sedangkan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, mempunyai peran utama untuk bekerjasama dengan pemangku kepentingan yang lain (Industri dan Masyarakat) untuk menyusun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan mengimplementasikannya sesuai dengan amanah Undang-Undang No.10 Tahun 2009.

2) Swasta atau Industri Pariwisata

Organisasi swasta/industri juga dijelaskan dalam UU No. 10 tahun 2009 pasal 1 angka 7 dan 8 yang berarti orang atau sekelompok orang (pengusaha) yang menjadi penyedia barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan kegiatan pariwisata. Menurut UU tentang kepariwisataan juga dijelaskan bahwa ada dua lembaga swasta yang ditetapkan sebagai mitra kerja pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah dan masyarakat dalam pengembangan serta pengelolaan kepariwisataan di Indonesia. Kedua lembaga swasta tersebut adalah:

a) Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI) dan Badan

Promosi Pariwisata Daerah (BPPD).

b) Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, yang keanggotaannya terdapat unsur-unsur yang terdiri dari pengusaha pariwisata, asosiasi usaha pariwisata, asosiasi profesi dan asosiasi lain yang terkait langsung dengan pariwisata.

c) Masyarakat pariwisata

Menurut penjelasan pasal 5 huruf e UU Kepariwisataan No.10 tahun 2009 menyebutkan bahwa organisasi masyarakat adalah masyarakat yang bertempat tinggal di dalam wilayah destinasi pariwisata yang berperan aktif mengorganisir kegiatan pariwisata dan diprioritaskan untuk mendapatkan manfaat dari penyelenggaraan kegiatan pariwisata di tempat tersebut. Masyarakat setempat yang berdomisili di sekitar destinasi yang dikunjungi wisatawan memegang peranan yang sangat penting, baik sebagai pelaku usaha, tenaga kerja maupun sebagai tuan rumah (*host*) dalam menyelenggarakan kegiatan kepariwisataan di suatu destinasi.

Ridwan (2012) mengemukakan pengertian objek wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Berdasarkan definisi diatas maka obyek wisata adalah tempat yang dikunjungi dengan berbagai keindahan yang

didapatkan, tempat untuk melakukan kegiatan pariwisata, tempat untuk bersenang-senang dengan waktu yang cukup lama demi mendapatkan kepuasan, pelayanan yang baik, serta kenangan yang indah di tempat wisata.

d. Jenis Objek Wisata

Penggolongan jenis objek wisata akan terlihat dari ciri-ciri khas yang ditonjolkan oleh tiap-tiap objek wisata. Dalam PERMANPAR No. 3 Tahun 2018 disebutkan bahwa daya tarik wisata terdiri dari:

- 1) Objek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam, serta flora dan fauna
- 2) Objek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan sejarah, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi dan tempat hiburan

Pada dasarnya obyek wisata di Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai dua bagian karena selain memiliki laut dengan daya tariknya dan keindahan alam, juga didukung oleh berbagai hasil karya manusia yang dapat menarik wisatawan. Selain itu juga didukung oleh kondisi masyarakat setempat yang masih kental dengan upacara adat seperti

1) Pengembangan Objek Wisata

Basis pengembangan pariwisata adalah potensi sumber daya keragaman budaya, seni, dan alam (pesona alam). Pengembangan sumber daya tersebut dikelola melalui pendekatan peningkatan nilai tambah sumber daya secara terpadu antara pengembangan produk

pariwisata dan pengembangan pemasaran pariwisata melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat lokal dalam rangka pengembangan pariwisata. Pengembangan obyek wisata yang baik akan meningkatkan potensi obyek wisata sehingga wisatawan banyak yang tertarik untuk berkunjung ke tempat wisata tersebut sehingga masyarakat pun memiliki lapangan pekerjaan untuk berusaha baik itu usaha kecil menengah (UKM) yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan lewat pajak juga akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Menurut Direktorat Jendral dalam Sunaryo (2013), obyek wisata atau daya tarik wisata dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

a) Daya Tarik Wisata Alam

Daya tarik wisata alam adalah daya tarik wisata yang dikembangkan dengan lebih banyak berbasis pada anugerah keindahan dan keunikan yangtersediadi alam, seperti :

- 1) Pantai dengan keindahan pasir putihnya, debaran gelombang ombak serta aksespandangnya terhadap matahari terbitatau tenggelam,
- 2) Laut dengan kekayaan terumbu karang dan ikannya
- 3) Danau dengan keindahan panoramanya
- 4) Hutan dan sabana dengan keaslian flora dan fauna
- 5) Gunung dengan daya Tarik vulkanonya
- 6) Sungai dengan kejernihan air dan kedahysatan arus
- 7) Air terjun dengan panorama kecuramannya

b) Daya Tarik Wisata Alam

Daya tarik wisata budaya adalah daya tarik wisata yang dikembangkan dengan lebih banyak berbasis pada hasil karya dan hasil cipta manusia, baik yang berupa peninggalan sejarah (*situs/heritage*) maupun nilai budaya yang masih hidup (*the living culture*) dalam kehidupan di suatu masyarakat, yang dapat berupa upacara/ritual, adat istiadat, seni pertunjukan, seni kriya, seni sastra, seni rupa, ataupun keunikan sehari-hari yang dimiliki oleh suatu masyarakat.

c) Daya Tarik wisata minat khusus

Daya tarik wisata budaya (*special interest*) adalah daya tarik wisata yang dikembangkan dengan lebih banyak berbasis pada aktivitas untuk pemenuhan keinginan wisatawan secara spesifik, seperti pengamatan satwa tertentu (*birds watching*) memancing (*fishing*), berbelanja (*shopping*), kesehatan dan penyegaran badan (*spa and rejuvenation*), arung jeram, golf, wisata agro, menghadiri pertemuan, rapat, perjalanan insentif, pameran dan wisata minat khusus lainnya yang biasanya terkait dengan hobi atau kegemaran seseorang wisatawan. Menurut Sunaryo (2013), untuk mempromosikan dan menjual produk wisata minat khusus di atas, penyelenggaraannya dapat dikemas menjadi sebuah event atau festival yang sangat menarik dan diselenggarakan secara

periodic serta terjadwal dalam suatu *Calender of Events* dan dipromosikan secara meluas dan sistematis. Beberapa contoh kemasan event dari tata kehidupan tradisional yang disajikan di Indonesia sebagai daya tarik wisata minat khusus yaitu:

- 1) Festival Takabonerate di Kabupaten Kepulauan Selayar.
- 2) Upacara pemakaman mayat di Tana Toraja.
- 3) Pembakaran mayat (ngaben) di Bali.

Obyek pariwisata dan segala atraksi yang diperlihatkan merupakan daya tarik utama mengapa seseorang dapat berkunjung pada suatu tempat. Oleh karena itu, keaslian dari obyek dan atraksi yang ditampilkan dipertahankan sehingga wisatawan merasa betah ditempat tersebut.

Adapun syarat yang harus dipenuhi agar daerah tujuan wisata tersebut benar-benar menjadi daerah wisata yang baik yaitu:

- 1) Daerah tersebut memiliki daya tarik yang lain atau berciri khas, baik itu obyek wisatanya ataupun atraksi yang ditampilkan.
- 2) Adanya fasilitas-fasilitas penunjang lainnya, seperti permainan rekreasi yang dapat membuat wisatawan lebih betah.
- 3) Tersedianya tempat berbelanja baik itu cenderamata, tempat jual makanan khas dan sebagainya.
- 4) Terdapat fasilitas-fasilitas umum yang vital seperti toilet, tempat parkir, dan tempat makan sehingga mempermudah wisatawan. Bukan itu saja, tetapi bisa pula dilengkapi dengan

ATM dan akses yang memadai untuk wisatawan.

Dalam proses pengembangan daerah wisata ada komponen-komponen yang harus bersinergi secara baik, yakni pihak-pihak yang bekerjasama yaitu pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Priwisata Kabupaten Banggai Laut , Sulawesi Tengah kemudian pihak swasta sebagai investor dan masyarakat sendiri sebagai ujung tombak dalam pengembangan pariwisata.

B. Peneliti Terdahulu

Dengan adanya penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebuah dasar bagi penulis untuk memulai sebuah penelitian. Untuk mendukung hasil dari penelitian ini, penulis akan menyajikan beberapa hasil dari sebuah penelitian terdahulu yang terkait dengan Pengembangan Objek Wisata Pantai Dalam Meningkatkan PAD. Adapun hasil penelitian terdahulu yang ditemukan penulis yaitu:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti	Judul penelitian	Perbedaan	Persamaan
-----------	----------------------	-------------------------	------------------	------------------

1	Angga Pradikta	Strategi Pengembangan Obyek Wisata Waduk Gunungrowo Indah Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pati.	Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah dalam segi objek penelitian dan jenis penelitiannya. Dimana penelitian terdahulu tersebut objeknya adalah Wisata Waduk Gunungrowo Kabupaten Pati. Kemudian metode penelitian tersebut adalah penelitian kuantitatif.	Persamaan terletak pada permasalahan yang diangkat dimana rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut sama dengan fokus masalah dalam penelitian ini.
2	Widodo Sihotang	Strategi Pengembangan Sektor Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Samosir (Studi Pada Dinas Pariwisata Seni Dan Budaya Kabupaten Samosir)	Perbedaan dari penelitian tersebut Dengan penelitian ini adalah objek penelitian. Dimana objek penelitian dalam skripsi tersebut, dilakukan di Dinas Pariwisata Seni Dan Budaya Kabupaten Samosir. Sedangkan penelitian ini dilakukan di Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember.	Persamaan antara penelitian tersebut dan penelitian ini adalah dalam tujuan dan metode penelitian. Dimana tujuan dari penelitian tersebut adalah mengetahui bagaimanakah strategi Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Samosir, dan untuk mengetahui upaya dalam pengembangan dan penataan wisata, promosi wisata, pembinaan/sadar wisata, kerjasama dengan pihak lain, yang dilakukan Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Samosir. Kemudian

				dalam bentuk penelitian, di dalam penelitian tersebut bentuknya penelitian deskriptif. Hal ini sama dengan bentuk penelitian pada penelitian ini yang juga penelitian deskriptif.
3	Wardatul Jannah	Pengembangan Usaha Sangkar Burung (Korong) Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Dawuhan Mangli Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember	Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus masalah yang diangkat. Dalam penelitian tersebut, mengangkat fokus masalah yaitu: 1) bagaimana pengembangan usaha sangkar burung (<i>korong</i>) dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Dawuhan Mangli Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember. 2) bagaimana kontribusi pengembangan usaha sangkar burung (<i>korong</i>) dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Dawuhan Mangli Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember. Sedangkan dalam penelitian ini mengangkat fokus	Sedangkan persamaannya terletak dalam jenis penelitian, penentuan sumber data, sumber data dan validitas data. Di mana keduanya menggunakan jenis penelitian kualitatif, penentuan sumber data menggunakan <i>purposive sampling</i> , sumber data berasal dari observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan Validitas data menggunakan triangulasi sumber.

			<p>masalah yaitu: 1) Bagaimana strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Jember. 2) Bagaimana kontribusi pariwisata dalam meningkatkan PAD Kabupaten Jember.</p>	
4.	Azizati Rahmani a	<p>Pengembangan Wisata Alun-Alun Kota Malang Prespektif Masalah Mursalah</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada Rumusan masalah dimana rumusan masalahnya adalah pandangan masyarakat terkait pengembangan alun-alun kota Malang dan pengembangan alun-alun kota Malang ditinjau Dari masalah mursalah. Sedangkan penelitian ini adalah Bagaimana Strategi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Jember dan Bagaimana Kontribusi Pariwisata Dalam Meningkatkan PAD Kabupaten Jember.</p>	<p>Persamaan penelitian tersebut dan penelitian ini terletak pada pendekatan penelitian dan teknik pengumpulan data. Dimana keduanya menggunakan pendekatan deskriptif dan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi.</p>

C. Sintesis Teori dan Hasil Penelitian

Sintesis adalah teknik kualitatif yang di gunakan untuk menggabungkan data-data primer yang sejenis untuk mendapatkan pemahaman yang baru tentang permasalahan yang diangkat.

Berikut ini adalah langkah-langkah melakukan penelitian sintesis menurut Perry and Hammond dalam Siswanto (2010):

1. Mengidentifikasi pertanyaan penelitian, hal ini dilakukan untuk mengetahui apa saja fokus permasalahan sehingga peneliti dan orang lain memahami apa yang akan di teliti.
2. Mengembangkan protokol penelitian meta sintesis, hal ini dilakukan untuk memberikan pedoman berupa literasi-literasi terkait meta sintesis maupun literasi mengenai hal yang akan di teliti.
3. Menetapkan lokasi data-data yang akan di analisis
4. Melakukan pemilihan data yang sesuai dengan masalah yang akan di analisis
5. Setelah semua data terkumpul, melakukan pemilihan kembali berdasarkan kualitas data yang cocok menjadi data penelitian
6. Melakukan analisis tiap data individu untuk mengetahui temuan pentingnya dengan menggunakan tabel analisis yang sudah di susun sesuai dengan literasi.
7. Menarik kesimpulan dari data-data yang sudah di analisis
8. Penyajian hasil.

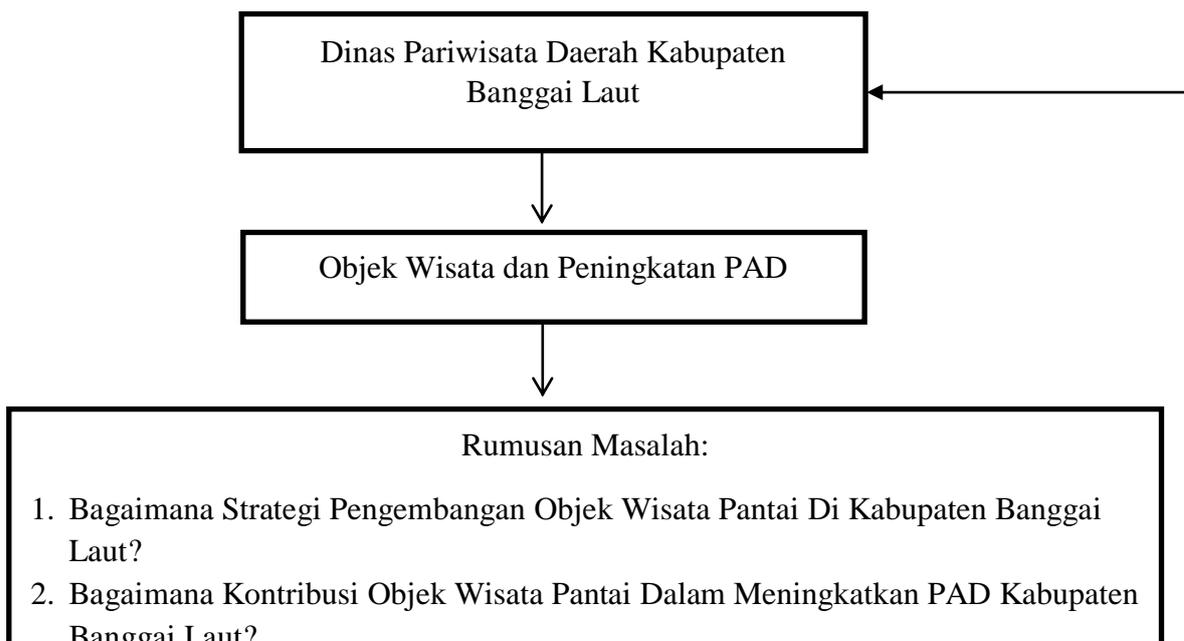
D. Kerangka Konseptual

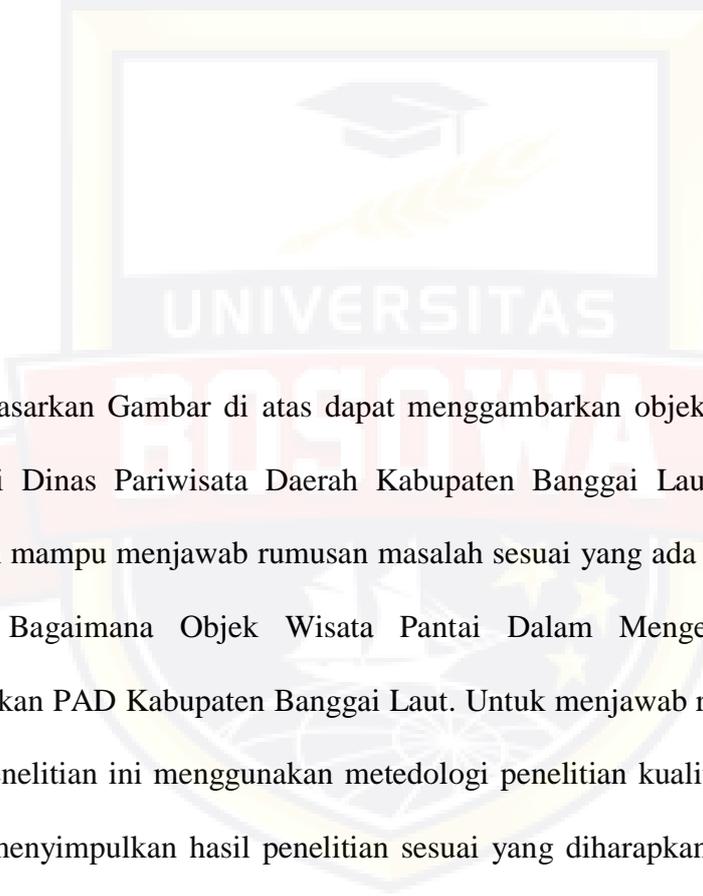
Untuk lebih jelasnya disajikan kerangka pikir yang dituangkan dalam bentuk skema sebagai berikut:



Gambar 2. 1

Kerangka Konseptual





Berdasarkan Gambar di atas dapat menggambarkan objek penelitian yang terdapat di Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Banggai Laut. Penelitian ini diharapkan mampu menjawab rumusan masalah sesuai yang ada dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Objek Wisata Pantai Dalam Mengembangkan Dan Meningkatkan PAD Kabupaten Banggai Laut. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif lalu peneliti berusaha menyimpulkan hasil penelitian sesuai yang diharapkan kemudian hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai rekomendasi kepada Instansi Pemerintah sebagai timbal balik (*Feed Back*) dalam meningkatkan dan mengembangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Objek Wisata Pantai.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Menurut Uma dan Roger (2017) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang melibatkan analisis data informasi yang bersifat deskriptif dan tidak dapat diukur secara langsung. Hal yang paling penting suatu barang atau jasa adalah kejadian fenomena dan gejala sosial adalah arti dari kejadian tersebut dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pengembangan konsep teori.

Sedangkan pendekatan yang dipakai berupa deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengelola data kemudian menyajikan data observasi agar pihak lain dapat dengan mudah memperoleh gambaran tentang objek yang diteliti dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dinas pariwisata kabupaten banggai laut Sulawesi tengah. Pelaksanaan penelitian ini berkisar selama kurang lebih dua bulan.

C. Fokus dan Deskripsi Fokus

Fokus penelitian memuat rincian pertanyaan tentang cakupan atau topik- topik yang akan diungkap atau digali dalam penelitian. Fokus penelitian merupakan garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisa hasil penelitian lebih terarah. Oleh sebab itu,

digunakanlah indikator- indikator agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu luas dan pada akhirnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi judul penelitian.

D. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data yang berupa manusia (narasumber) sangat penting peranannya sebagai individu yang memiliki informasinya. Peneliti dan narasumber di sini memiliki posisi yang sama, oleh karena itu narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia dapat lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki. Karena posisi inilah sumber data yang berupa manusia di dalam penelitian kualitatif disebut sebagai informan. 5 Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian.

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis data

Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Tylor dalam bukunya Moleong (2002) yang dimaksud penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian ini menyusun desain yang secara terus menerus disesuaikan dengan kenyataan di lapangan. Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk mengkaji atau membuktikan kebenaran suatu teori tetapi teori yang sudah ada dikembangkan dengan menggunakan data yang dikumpulkan.

2. Sumber data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian terkait. data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari responden yang terpilih di lokasi penelitian. data primer diperoleh dengan cara memberikan daftar pertanyaan (*questionnaire*) dan melakukan wawancara (*interview*).

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan teknik *sampling purposive*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. teknik ini lebih tepat digunakan oleh peneliti apabila peneliti memerlukan kriteria khusus agar sampel yang di ambil akan sesuai dengan tujuan penelitian dan dapat memecahkan permasalahan penelitian serta dapat memberikan nilai yang lebih representatif. Sehingga teknik yang diambil dapat memenuhi tujuan sebenarnya.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang di hasilkan dan diharapkan dapat membantu mengungkapkan data yang diharapkan. Sumber data sekunder dapat membantu memberi keterangan atau data pelengkap sebagai bahan perbandingan. Dalam hal ini data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari literature-literatur dan berbagai macam sumber data lainnya seperti: buku-buku yang relevan, jurnal dan internet.

Dalam hal ini, penelitian menggunakan sumber data sekunder yaitu dokumen kantor dinas pendapatan daerah kabupaten banggai laut, Sulawesi tengah berupa dokumen tentang personalia dan dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian seperti buku dari Malayu S.P Hasibuan, dengan judul pengelolaan pajak pembangunan diterbitkan oleh Bumi Aksara tahun 2017, buku dari Veithzal Rivai, Diterbitkan oleh PT Raja Grafindo Persada, tahun 2014 dan Andi Fithriyah Iskandar. 2020. Skripsi. Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pengembangan Objek Wisata Pantai di Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut sugiyono, (2018) bahwa pengumpulan data diperoleh dari angket atau kuesioner, wawancara, studi dokumentasi. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner, wawancara dan studi dokumentasi.

Dalam menghimpun data sebagai dasar dalam melakukan penelitian, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab kepada karyawan Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Laut Dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Laut.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data dari buku-buku, jurnal-jurnal penelitian, majalah dan internet yang memiliki relevansi dengan penelitian.

G. Teknik Analisis Data

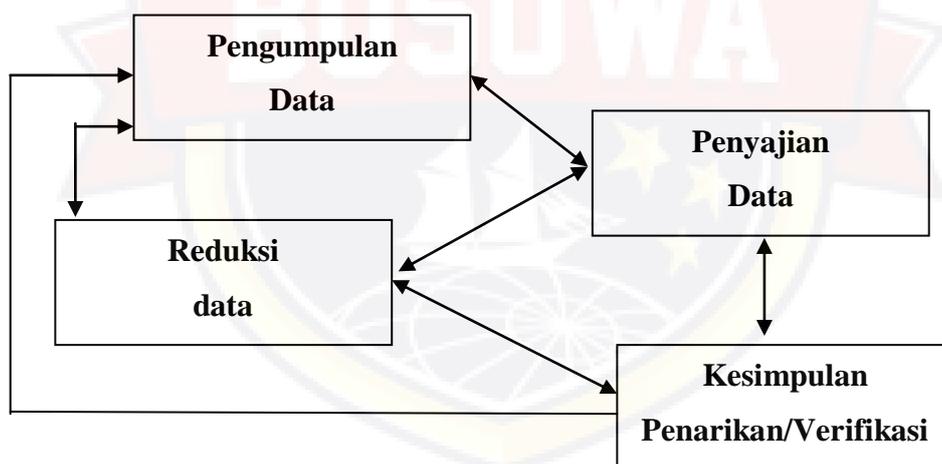
1. Analisis Deskriptif

Analisis data menurut Patton dalam bukunya Moleong (2002 : 103), adalah proses mengatur urutan data mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian besar.

Analisis data didalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Miles dan Huberman dalam H. B. sutopo, menyajikan dua model pokok proses analisis pertama, model analisis mengalir, dimana tiga komponen analisis (reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi) dilakukan saling menjalin dengan

proses pengumpulan data dan mengalir bersamaan. Kedua, model analisis interaksi, dimana komponen reduksi data dan sajian data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Setelah data terkumpul, maka tiga komponen analisis (reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan) berinteraksi. Miles dan Huberman, 1992: 20) menyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang merupakan proses penggambaran daerah penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan empat tahap, berikut skemanya:

Gambar 3.1
Skema Analisis Data



Sumber : (Miles dan Huberman, 1992: 20)

H. Rencana Pengujian Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif diantaranya yaitu uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas, dan uji konfirmabilitas.

1. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Dalam penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Ketika di lapangan ditemukan bahwa terdapat kekurangan tenaga kesehatan di lingkungan rumah sakit, maka permasalahan kekurangan tenaga kesehatan inilah yang akan dieksplorasi informasinya oleh peneliti lebih detail, bukan yang terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan. Uji kredibilitas data atau kepercayaan data penelitian kualitatif terdiri atas perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan member check.³

a. Perpanjangan pengamatan Pada tahap awal peneliti memasuki lapangan, peneliti masih dianggap sebagai orang asing, masih dicurigai, sehingga informasi yang diberikan belum lengkap, tidak mendalam, dan masih memungkinkan banyak hal yang dirahasiakan. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk rapport, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Apabila telah terbentuk rapport, maka telah terjadi kewajaran dalam penelitian, dimana kehadiran peneliti tidak lagi mengganggu perilaku yang dipelajari. Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian, yaitu dengan cara melakukan pengamatan apakah data yang diperoleh sebelumnya itu benar atau tidak ketika dicek kembali

ke lapangan. Bila setelah dicek kembali ke lapangan sudah benar, berarti sudah kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri oleh peneliti. Sebagai bentuk pembuktian bahwa peneliti telah melakukan uji kredibilitas, maka peneliti dapat melampirkan bukti dalam bentuk surat keterangan perpanjangan pengamatan dalam laporan penelitian.³

- b. Meningkatkan ketekunan Peneliti dapat meningkatkan ketekunan dalam bentuk pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu benar atau tidak, dengan cara melakukan pengamatan secara terus-menerus, membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi yang terkait, sehingga wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam. Sebagai contoh, ketika melihat sekelompok masyarakat yang sedang olahraga pagi, bagi sebagian orang aktivitas ini hanya sebagai sarana untuk memelihara kesehatan secara fisik, namun peneliti dapat memiliki pandangan yang berbeda setelah dilakukannya pencermatan secara mendalam, sehingga diketahui olahraga pagi itu merupakan sarana untuk transaksi bisnis.
- c. Triangulasi Sebuah konsep metodologis pada penelitian kualitatif yang perlu diketahui oleh peneliti kualitatif selanjutnya adalah teknik triangulasi. Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari penelitian kualitatif. Triangulasi diartikan juga sebagai kegiatan pengecekan data melalui beragam sumber, teknik, dan waktu.^{1,3}

- 1) Triangulasi sumber Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Sebagai contoh, untuk menguji kredibilitas data tentang gaya kepemimpinan menteri kesehatan, maka pengujian keabsahan terhadap data yang telah diperoleh dapat dilakukan kepada bawahan yang dipimpin, kepada atasan yang menugasi, dan kepada rekan kerja. Data dari ketiga sumber yang berbeda tersebut, tidak dapat dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dapat dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari tiga sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis tersebut dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang selanjutnya dapat dilakukan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data tersebut.
- 2) Triangulasi teknik Triangulasi teknik dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan data kepada sumber yang sama, namun dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang telah diperoleh melalui wawancara mendalam kepada informan A terkait persepsi, gagasan, harapan, sikap, gaya hidup, dan lingkungan masyarakat terhadap pengimplementasian kesehatan gratis, maka dilakukan pengecekan informasi kembali melalui observasi, ataupun dokumentasi kepada informan A tersebut, maupun sebaliknya.
 - a) Wawancara mendalam (indepth interview): sebagian besar sumber data penelitian kualitatif didasarkan pada wawancara mendalam, teknik ini menggunakan pertanyaan open-ended,

dengan mengutamakan sikap etis terhadap informan yang sedang dipelajari. Data yang diperoleh berupa persepsi, pendapat, perasaan, dan pengetahuan.6,9,10,11

b) Observasi (pengamatan): observasi merupakan salah satu dasar fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, khususnya menyangkut ilmu sosial dan perilaku manusia. Observasi ini dilakukan dengan pengamatan terhadap apa yang diteliti yang hasilnya dapat berupa gambaran yang ada di lapangan dalam bentuk sikap, tindakan, pembicaraan, maupun interaksi interpersonal 9,12.

c) Dokumen: dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto) dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian. 13,14 Apabila dengan berbagai teknik tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda satu sama lainnya, peneliti dapat melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang terkait hingga didapatkan kepastian dan kebenaran datanya.3

d) Triangulasi waktu Triangulasi waktu dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan kembali terhadap data kepada sumber dan tetap menggunakan teknik yang sama, namun dengan waktu atau situasi yang berbeda. Sebagai contoh, ketika ingin mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung dari peningkatan pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan

Masyarakat (Puskesmas), maka informan sebelumnya yang telah dilakukan wawancara mendalam, diulangi wawancaranya pada waktu atau situasi berbeda. Apabila hasil uji tetap menunjukkan data yang berbeda, peneliti dapat melakukannya secara berulang hingga ditemukan kepastian data.³

- e) Analisis kasus negative Kasus negatif merupakan suatu kondisi data/kasus yang berbeda dengan hasil penelitian. Analisis kasus negatif dapat dilakukan dengan melakukan pencarian data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan secara lebih mendalam. Uji ini bergantung pada seberapa besar kasus negatif, jika ada 99% orang mengatakan bahwa si A, pengedar narkoba, sedangkan 1% menyatakan tidak (negatif), maka peneliti harus mencari tahu secara mendalam dan menemukan kepastian apakah 1% kelompok ini benar atau tidak. Jika pada akhirnya yang 1% kelompok ini kemudian menyatakan bahwa si A adalah pengedar narkoba, berarti kasus negatifnya tidak ada lagi. Dengan demikian, temuan penelitian menjadi lebih kredibel.
- f) Menggunakan bahan referensi Bahan referensi merupakan bagian dari pendukung untuk membuktikan data yang ditemukan oleh peneliti secara autentik. Sebagai contoh, data hasil wawancara mendalam dengan informan dilengkapi rekaman audio-visual saat dilakukannya wawancara mendalam.³ f) Member check Member check merupakan suatu

proses pengecekan data kepada sumber data. Adapaun tujuan dilakukannya member check yaitu agar informasi yang diperoleh dalam laporan penelitian memiliki kesesuaian dengan apa yang dimaksudkan oleh sumber data atau informan. Member check dapat dilakukan setelah berakhirnya satu periode pengumpulan data. Mekanismenya dapat dilakukan secara individual, yaitu peneliti menemui sumber data atau bertemu dalam forum diskusi kelompok. Pada proses ini data dapat ditambah, dikurangi, ataupun ditolak oleh sumber data hingga diperolehnya kesepakatan bersama, dapat berupa dokumen yang telah ditanda-tangani.³

2. Uji Transferabilitas (*Transferability*)

Dalam penelitian kuantitatif, transferabilitas disebut validitas eksternal yang terkait dengan konsep generalisasi data. Transferabilitas menunjukkan derajat ketepatan atau sejauh mana dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana informan tersebut dipilih. Pada penelitian kualitatif, nilai transferabilitas tergantung pada pembaca, sampai sejauh mana hasil penelitian tersebut dapat diterapkan pada konteks dan situasi sosial yang lain. Jika pembaca memperoleh gambaran dan pemahaman jelas tentang laporan penelitian (konteks dan fokus penelitian), seperti mengenai gambaran kualitas pelayanan kesehatan praktik bidan mandiri di Kabupaten X secara jelas, maka hasil penelitian itu dapat dikatakan memiliki transferabilitas tinggi.^{3,15}

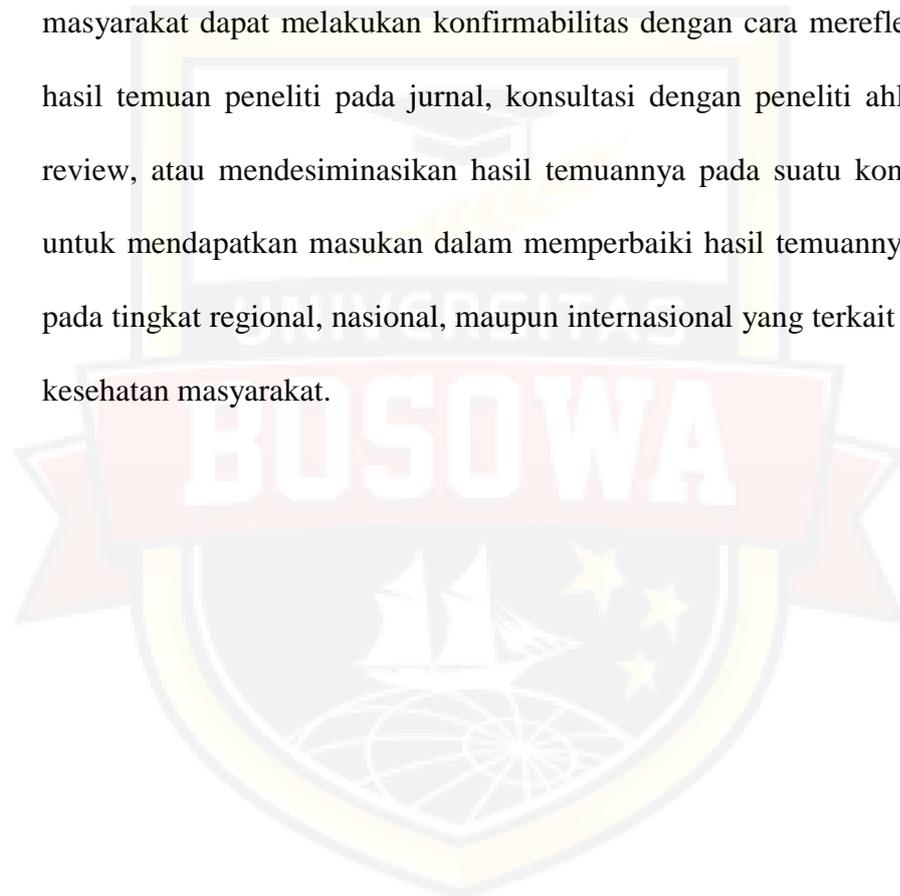
3. Uji Dependabilitas (*Dependability*)

Dalam penelitian kuantitatif, dependabilitas disebut reliabilitas. Dikatakan memenuhi dependabilitas ketika peneliti berikutnya dapat mereplikasi rangkaian proses penelitian tersebut. Uji dependabilitas dapat dilakukan melalui kegiatan audit terhadap seluruh proses penelitian. Hasil penelitian tidak dapat dikatakan dependable jika peneliti tidak dapat membuktikan bahwa telah dilakukannya rangkaian proses penelitian secara nyata.³ Mekanisme uji dependabilitas dapat dilakukan melalui audit oleh auditor independen, atau pembimbing terhadap rangkaian proses penelitian. Sebagai contoh, bagaimana peneliti mulai menentukan masalah maupun fokus penelitian, misalnya terkait implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), bagaimana menentukan sumber data yang dapat menjelaskan tentang KTR, bagaimana memasuki lapangan, bagaimana mekanisme pengumpulan data, bagaimana melakukan pemeriksaan keabsahan data, bagaimana melakukan analisis data, hingga bagaimana melakukan penarikan kesimpulan. Jika peneliti tidak mempunyai rekam jejak aktivitas lapangan/penelitiannya, maka dependabilitasnya dapat diragukan. 3.

4. Uji Konfirmabilitas (*Konfirmability*)

Dalam penelitian kuantitatif, konfirmabilitas disebut objektivitas, yaitu apabila hasil penelitian telah disepakati banyak orang.³ Konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif lebih diartikan sebagai konsep intersubjektivitas (konsep transparansi), yang merupakan bentuk ketersediaan peneliti dalam mengungkapkan kepada publik mengenai bagaimana proses dan elemen-elemen dalam penelitiannya, yang

selanjutnya memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan assessment/penilaian hasil temuannya sekaligus memperoleh persetujuan diantara pihak tersebut.¹⁵ Konfirmabilitas adalah suatu proses kriteria pemeriksaan, yaitu langkah apa yang dipilih oleh peneliti dalam melakukan konfirmasi hasil temuannya. Peneliti di bidang kesehatan masyarakat dapat melakukan konfirmabilitas dengan cara merefleksikan hasil temuan peneliti pada jurnal, konsultasi dengan peneliti ahli, peer review, atau mendesiminasikan hasil temuannya pada suatu konferensi untuk mendapatkan masukan dalam memperbaiki hasil temuannya, baik pada tingkat regional, nasional, maupun internasional yang terkait bidang kesehatan masyarakat.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Laut

Berbicara tentang potensi Sumber Daya Alam, daerah Banggai mempunyai potensi yang cukup menarik untuk dikelola, namun untuk bias mengelola potensi itu kita butuh yang namanya lembaga yang mempunyai kewenangan akan hal itu, maka pada tahun 2014 dikeluarkanlah yang namanya Peraturan Bupati nomor 22 Tahun 2014 yang di dalamnya dibentuk Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Banggai Laut, dan pemilihan para pegawainya terealisasi pada tanggal 19 Maret 2015 yang dituangkan dalam Peraturan Bupati 2015, Dari awal terealisasinya pegawai dinas pariwisata dan ekonomi pada Tahun 2015 hingga sekarang belum ada pergantian kepala dinas.

Sejak awal sampai saat ini Kepala Dinas pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki sangat banyak kemajuan yaitu dalam sector pengembangan dan pembangunan objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Banggai Laut, wisata alam maupun wisata Baharinya. Hal tersebut sesuai dengan visinya Kabupaten Banggai Laut yaitu Banggai Laut Sebagai Kabupaten Maritim Menuju Ekowisata Bahari Dunia yang Berbudaya dan Berdaya Asing.

Kepala Dinas sebagai pusat dari semua kegiatan dinas pariwisata dan ekonomi kreatif dalam melakukan pengembangan maupun pembangunan. Hampir semua sebagai penentu pokok pembangunan di tempat-tempat

yang berpotensi wisata terutama wisata unggulan di kabupaten banggai laut. Dalam hal ini kepala dinas adalah orang yang mengatur berbagai hal-hal pokok yang ada di kantor dinas pariwisata dan ekonomi kreatif tersebut. Ia harus mengkoordinir kerja pegawai-pegawai dengan baik sehingga fungsinya selaku pusat pengendalian kantor dinas pariwisata dan ekonomi kreatif dapat berjalan dengan efisien dan efektif.

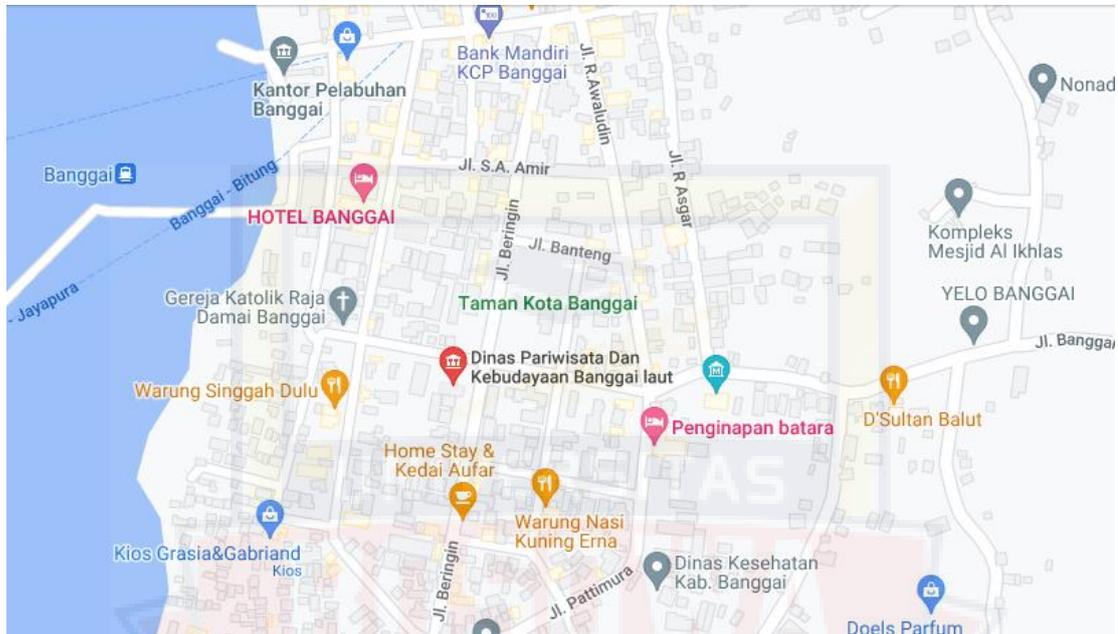
2. Keadaan Pegawai

Sumber daya pegawai menjadi salah satu keberhasilan pencapaian tujuan organisasi atau sebuah instansi. Karena dengan tersedianya sumber daya lainnya tanpa ada kualitas dari pegawai itu sendiri, maka dapat menghambat aktivitas pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Komposisi sumber daya pegawai dan staf honorer di Dinas Pariwisata dan ekonomi kreatif di kabupaten banggai laut berjumlah 40 orang

3. Letak Geografis Dinas Pariwisata kabupaten Banggai Laut

Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Laut yang beralamat di Jl. Jogugu Sopia, Lampa, Kec. Banggai, Kab. Banggai Laut, Sulawesi Tengah 94891. berikut denah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Banggai Laut:

Gambar 4.1
Denah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Laut



Sumber: Google Maps (diolah)

4. Visi dan Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Laut

a. Visi

“Terwujudnya Banggai Laut Menjadi Daerah Tujuan Wisata Dengan Kearifan Lokal Yang Berbudaya dan Berdaya Saing”

b. Misi

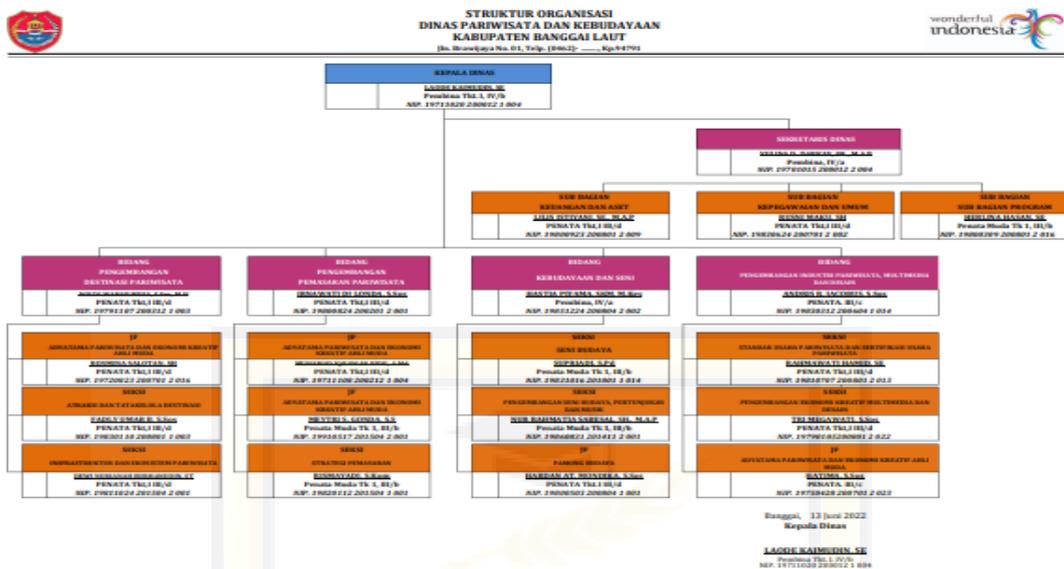
- 1) Melindungi dan Melestarikan Nilai Budaya dan Kekayaan Budaya, yang bermakna meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan bidang kesenian, meningkatkan pelestarian nilai-nilai tradisi dan peningkatan kualitas pelestarian warisan budaya.
- 2) Mengembangkan Pariwisata menjadi Daerah Tujuan Wisata yang

Berdaya Saing, yang bermakna pengembangan pariwisata melalui promosi dan pencitraan pariwisata sehingga menghasilkan produk destinasi pariwisata yang berdaya saing dan berbasis Sapta Pesona/Sadar Wisata.

- 3) Meningkatkan Profesionalisme SDM di bidang Kebudayaan dan Pariwisata, yang bermakna peningkatan kapasitas dan profesionalisme melalui pengembangan standart kompetensi dan sertifikasi terhadap profesi pelaku kebudayaan dan pariwisata serta peningkatan kerjasama dan kemitraan/kelembagaan.
- 4) Meningkatkan Industri Kepariwisataan, yang bermakna penciptaan inovasi melalui penelitian dan pengembangan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

5. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Laut

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Laut



6. Tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Laut

Adapun Tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Laut, sebagaimana yang tertuang dalam peraturan Bupati Banggai laut tahun 2017 BAB III Pasal 3 yaitu :

- a. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, mempunyai fungsi:
 - 1) Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

7. Badan Hukum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Laut

Badan hukum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Laut tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 3 Tahun 2017 tentang uraian tugas, fungsi dan tata kerja dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten Banggai Laut. Dalam peraturan daerah tersebut dijelaskan bahwa salah satu perangkat organisasi daerah adalah Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Laut. Dikeluarkannya Peraturan Daerah tersebut, kemudian menghapus status Peraturan Daerah sebelumnya tentang status Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Laut.

8. Jumlah Objek Wisata di Kebudayaan Kabupaten Banggai Laut

Jumlah objek wisata pantai yang ada di Kabupaten Banggai Laut berjumlah 10 objek wisata pantai. Untuk lebih lengkapnya, berikut daftar objek wisata di Kabupaten Banggai Laut, yaitu:

Tabel 4.1
Daftar Objek Wisata Pantai Kabupaten Banggai Laut

No	Nama Objek Wisata	Alamat	Jenis Wisata
1	Pantai Pulung	Desa Tolokibit	Alam
2	Pantai Batu lubang	Desa Pasir Putih	Alam
3	Pantai Bukit Popisi	Desa Mbuang-Mbuang	Alam
4	Pantai Oyama	Desa Lokotoy	Alam
5	Pantai Bongo	Desa Bone Baru	Alam

6	Pantai Lambangan Pauno	Desa Kendek	Alam
7	Pantai Pompon	Desa Pompon	Alam
8	Pantai Pasir Putih	Desa Pasir Putih	Alam
9	Pantai Kelama Lima	Desa Kelapa lima	Alam
10	Pulau Bandang	Desa Monsongan	Alam

Sumber: Dokumentasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (2022)

B. Penyajian Data dan Analisis

Setelah peneliti mengetahui latar belakang objek, maka berikut ini akan peneliti sajikan data yang telah diperoleh peneliti dari lapangan, baik dari data yang dihasilkan dari observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti.

Data yang diambil dari wawancara, observasi dan dokumentasi akan dijelaskan dengan deskriptif kualitatif yakni penelitian yang menggambarkan data-data yang ada tanpa menggunakan hipotesis untuk meneliti tentang Pengembangan Objek Wisata Pantai Dalam Peningkatan PAD Kabupaten Banggai Laut. Adapun data yang dipaparkan terfokus pada beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Strategi Pengembangan Objek Wisata Pantai Kabupaten Banggai Laut

Dalam meningkatkan kualitas pariwisata dan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Banggai Laut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Laut merupakan lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab dalam hal pengembangan dan pembangunan kepariwisataan.

Adapun beberapa strategi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Banggai Laut mengacu pada komponen-komponen di undang-undang tentang kepariwisataan adalah sebagai berikut:

a. Melakukan koordinasi dengan pelaku usaha pariwisata

Melakukan koordinasi dengan pelaku usaha pariwisata dilakukan agar objek wisata yang mengetahui hal-hal yang terjadi di objek wisata. Selain itu, guna menyelaraskan standarisasi objek pariwisata maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Laut perlu melakukan koordinasi mengenai jumlah objek wisata, kualitas sumber daya manusia (SDM), dan lain-lain. Namun bukan hanya koordinasi, namun juga verifikasi dan mengawasi serta evaluasi terhadap pelaku usaha kepariwisataan.

Strategi tersebut kemudian dimasukan dan diaplikasikan sebagai rencana program dan kegiatan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Laut yang tertuang dalam rencana strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Laut. Program tersebut yaitu:

1) Pengembangan kemitraan

Dari program tersebut kemudian menghasilkan Kegiatan-kegiatan, antara lain:

a) Pengembangan dan penguatan informasi *database*.

Untuk pengembangan dan penguatan data base diwujudkan dengan pembuatan buku Informasi (*database*) Pariwisata Kabupaten Banggai Laut. Dalam buku tersebut menghimpun

data-data seperti jumlah objek wisata, jumlah hotel, rumah makan, restoran, usaha jasa boga (*catering*), biro perjalan dan data kunjungan wisatawan baik wisatwan nusantara (wisnu) maupun wisatawan mancanegara (wisman).

Ibu Dewi Nurjannah Burhanudin mengatakan:

“Bentuknya seperti buku yang saya kasih itu, Iya buku itu (informasi *database*) memang untuk mempermudah apabila ada mahasiswa atau siapapun yang ingin mengetahui informasi pariwisata di banggai laut.”

Ibu Rasmina Salotan menambahkan:

“Untuk datanya (data wisnu, wisman, jumlah wisata dan lain-lain) memang tertampung disini (buku *database*). Tetapi cara pelaporannya sifatnya manual.”

Dengan dibukukannya informasi pariwisata Kabupaten Banggai Laut, maka semua kalangan akan lebih mudah dalam mengakses informasi seta melihat perkembangan pariwisata di Kabupaten Banggai Laut.

- b) Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya.

Pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri dilakukan untuk menselaraskan langkah dalam mengembangkan objek wisata baik yang swasta ataupun milik pemerintah daerah (Pemda).

Ibu Dewi Nurjannah Burhanudin mengatakan:

“Kegiatan forum komunikasi itu adalah Kita duduk bersama dan membahas apa yang Kita miliki di Banggai Laut

(Pariwisata)”

Ibu Rasmina Salotan menambahkan:

“Kalau Kita secara resmi nggak ada sih, tapi kalau sekadar ngobrol yang ada kaitannya dengan objek wisata atau destinasi gitu, kan disini ada K P A (Komunitas Pencinta Alam) jadi rata-rata yang masuk disitu pengelola objek wisata di Banggai. ya mungkin dari situ sering dapat masukan dan *sharing*.”

Dengan adanya forum KPA, maka dengan demikian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banggai lebih mudah dalam mensosialisasikan strategi pengembangan pariwisata daerah.

c) Pengembangan SDM dan profesionalisme bidang pariwisata.

Untuk menstandarisasi serta mengembangkan objek wisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Laut mengikutsertakan pengelola objek wisata dalam pelatihan maupun seminar pengembangan objek wisata. Pelatihan dilakukan satu tahun sekali dengan peserta terbagi dari beberapa elemen, misalnya duta wisata, karyawan di objek wisata, biro perjalanan dan lain-lain.

Ibu Dewi Nurjannah Burhanudin mengatakan:

“Hotel itu ada uji kompetensi (sertifikasi). Jadi ibaratkan punya sepeda, mereka sudah ada simnya. Sehingga ketika mereka berpindah kerja, maka sertifikasinya itu bisa digunakan. Dengan adanya sertifikat itu, Mereka bisa diperaya oleh pemilik atau pengusaha.”

Ibu Rasmina Salotan menambahkan :

“Pelatihan itu terkait tentang bagaimana pegawai melayani tamu di objek-objek wisata. Nah itu kemudian itu Kita adakan

pelatihan. Termasuk sertifikasi pegawai, jadi pegawai itu bekerja sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP).”

Ibu ibu Tri Megawati:

“Yang Kita anggarkan itu ada sertifikasi yang kaitannya dengan hotel, rumah makan, biro perjalanan. Yang selama ini sudah lima tahun tetap dilaksanakan. Kadang apabila ada permintaan dari provinsi atau pusat kementerian itu kita ngirim ya dari pelaku-pelaku objek pariwisata itu.”

Selain itu juga dilakukan sertifikasi kepada karyawan-karyawan hotel. Hal ini bertujuan agar karyawan hotel dapat menjalankan pekerjaannya sesuai dengan SOP dan lebih mudah apabila berpindah kerja dari hotel satu ke hotel lainnya karena sudah tersertifikasi. Sertifikasi dilakukan satu tahun sekali.

d) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata.

Seperti halnya dengan pembentukan forum komunikasi dengan pelaku usaha pariwisata, peningkatan peran serta masyarakat ini dilakukan dengan pembentukan Forum yang bekerjasama dengan bidang pemasaran dan kerjasama pariwisata yaitu program pembentukan kelompok sadar wisata (pokdarwis). Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan masyarakat, terlebih kaum muda agar lebih sadar akan potensi- potensi pariwisata di daerahnya masing-masing.

Ibu Irnawati Dj Londa Mengatakan :

“Bagaimanapun kita sebagai dinas harus bisa merangkul orang-orang atau masyarakat yang ada disekitar objek wisata, maka akan dijadikan kelompok sadar wisata (pokdarwis). Jadi

betapa pentingnya terbentuknya pokdarwis di masing-masing daerah yang mempunyai potensi destinasi wisata.”

Selain kegiatan pembentukan pokdarwis, juga dilakukan kegiatan-kegiatan atau *event* yang melibatkan masyarakat.

e) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Ibu Dewi Nurjannah Burhanudin mengatakan:

“Kita juga mengadakan survei *monitoring*, apa saja yang menjadi kekurangan di objek wisata dengan waktu kondisional. Jadi kalau ada yang laporan dari objek wisata di objek wisata itu kok seperti ini seperti itu atau apa saja, Kita langsung monitor ke sana.”

Ibu Rasmia Salotan menambahkan

“Kegiatan *monitoring* ini kita lakukan juga untuk mengetahui jumlah wisnu dan wisman yang singgah ke Banggai Laut. untuk itu, hotel itu memberikan data setiap bulan kepada Kita. Itu bisa menunjukkan bahwa orang-orang yang masuk ke pariwisata khususnya hotel di Kabupaten laut itu berapa.”

Ibu ibu Tri Megawati:

“Untuk yang dimonitoring semua (bukan hanya UPTD). Kalau kita biasanya rutin, tapi kalau komplain atau masukan dari masyarakat maka kami dahulukan yang masukan itu. jadi semua yang ada kaitannya dengan pariwisata itu laporannya ke sini. Yang dilaporkan terkait pengunjung di hotel maupun objek wisata. Ada pelaporan kunjungan perbulan.”

Monitoring dilakukan secara fleksibel sesuai kebutuhan.

Biasanya, selain fleksibel monitoring juga dilakukan ketika ada pengaduan atau dari objek wisata.

b. Mengembangkan destinasi pariwisata

Strategi pengembangan destinasi pariwisata dilakukan agar destinasi pariwisata memiliki standar yang bagus dan dapat menarik

minat wisatawan baik nusantara maupun mancanegara untuk mengunjungi pariwisata di Kabupaten Banggai Laut.

Strategi tersebut kemudian dimasukan dan diaplikasikan sebagai rencana program dan kegiatan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Laut yang tertuang dalam rencana strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Laut. Program tersebut yaitu:

1) Pengembangan destinasi pariwisata

Dari program tersebut kemudian menghasilkan Kegiatan-kegiatan, antara lain:

a) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata.

Beralihnya status dari Kantor Pariwisata dan Kebudayaan menjadi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kabupaten Banggai Laut membuat lembaga kepariwisataan ini memiliki wewenang dalam hal pembangunan fasilitas. Hal ini tidak bisa dilakukan ketika masih berstatus kantor. Pembangunan sarana dan prasarana ini dilakukan agar tercipta objek pariwisata di Kabupaten Banggai Laut yang berskala internasional.

Ibu Dewi Nurjannah Burhanudin mengatakan:

“Kan kita menjadi dinas masih kemarin ini. jadi pembanguna juga tidak terlalu banyak. Namun saat ini sudah proses pengerjaan. kita membangun pentas untuk pertunjukan hiburan. Dan umumnya di UPTD itu saat ini masih dalam tahap pembenahan, jadi kalau ada yang perlu di renovasi ya direnofasi”

Ibu Rasmina Salotan menambahkan :

“Saya rasa pengembangan itu salah satu yang harus kita fokuskan adalah pembangunan sarana dan prasarana di objek wisata. Karena Kita baru aja beralih menjadi Dinas, maka saat ini Kita sedang menggalakan pembangunan di pariwisata Pariwisata Banggai ini.”

Ibu ibu Tri Megawati:

“Sesuai perintah bupati kita fokuskan kerembangan dulu. terkait sarana dan prasarananya kita bangun fasilitas seperti gazebo pokonya berbentuk fisik di objek wisata.”

Salah kegiatan yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Laut dalam program pembangunan sarana dan prasarana adalah pembangunan fasilitas di objek wisata/ daerah tujuan wisata.

Namun pembangunan fasilitas ini hanya dilakukan untuk objek pariwisata yang termasuk dalam unsur pelaksana teknis Daerah (UPTD) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Laut. Untuk objek pariwisata yang diluar UPTD (milik swasta), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Laut tidak menganggarkan dana pembangunan untuk objek pariwisata tersebut. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Laut hanya membantu dalam 2 hal, yaitu:

1. Mengikut sertakan pengelola objek wisata dalam pelatihan pengembangan objek wisata.

Ibu Yulina D. Darkay mengatakan:

“Untuk yang swasta kita hanya membantu, mengadakan pembinaan, terus kalau ada pelatihan diluar kota sampai provinsi, kalau memang itu sudah rame di objek wisata itu kita undang pengusaha-pengusaha objek wisata itu.

Ibu Yulina D. Darkay mengatakan:

“Kadang apabila ada permintaan dari provinsi atau pusat kementerian itu kita ngirim ya dari pelaku- pelaku objek pariwisata itu.”

Untuk objek wisata milik swasta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan membantu dengan mengadakan pembinaan dan mengikutkan pelatihan di luar daerah.

2. Memberikan bantuan pembangunan fasilitas untuk objek pariwisata yang ramai dikunjungi wisatawan.

Ibu Yulina D. Darkay mengatakan:

“Misalnya di pulau bandang, itu kan ada arena pulau. Karena ramai dikunjungi wisatawan, maka kami survei apa yang dibutuhkan. Ternyata disana tidak ada tempat berteduh, sehingga kemudian kami bangun gazebo.”

Pembangunan fasilitas di objek wisata yang dimiliki swasta ini dilakukan namun dengan klasifikasi tertentu misalnya pemilik termasuk pokdarwis yang dibina oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Laut atau objeknya ramai dikunjungi wisatawan.

b) Pengembangan daerah tujuan wisata

Dalam mengembangkan daerah tujuan wisata atau objek wisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Laut melakukan standarisasi hingga pembangunan fasilitas di objek wisata. Kemudian dengan mendorong pengelola objek wisata untuk meningkatkan kualitas pariwisata bukan hanya dari aspek pembangunan namun juga layanan dan menggalakan

promosi. Sehingga ketika objek wisata ramai dikunjungi wisatawan, maka pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Laut dapat membantu berbentuk fasilitas di objek pariwisata.

Ibu Yulina D.Darkay mengatakan:

“Kalau itu kaitannya biasanya promosinya aja ya, yang bisa kita lakukan itu promosinya. Memperkenalkan saja, apa saja yang ada di Kabupaten Banggai Laut. misalnya di buku *data base* Kita cantumkan semua objek wisata yang ada di Kabupaten Banggai Laut.

Selain itu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banggai juga melakukan promosi melalui buku *data base* pariwisata Kabupaten Banggai Laut.

c. Melakukan Pemasaran Pariwisata

Pemasaran penting dilakukan sebagai upaya memperkenalkan objek wisata kepada wisatawan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Laut melakukan banyak strategi dalam memasarkan pariwisata di Kabupaten Banggai Laut.

Strategi tersebut kemudian dimasukan dan diaplikasikan sebagai rencana program dan kegiatan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Laut yang tertuang dalam rencana strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Banggai Laut.

Program tersebut yaitu:

1) Pengembangan pemasaran pariwisata

Dari program tersebut kemudian menghasilkan Kegiatan-kegiatan, antara lain:

a) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata.

Ibu Dewi Nurjannah Burhanudin mengatakan:

“Kita promosi menggunakan internet. Namun tahun ini sudah tidak dikelola oleh Kita karena sekarang promosinya dipusatkan di bagian humas.”

Ibu Rasmia Salotan menambahkan :

“Kita ada *website*, namun untuk tahun ini dijadikan satu dengan bagian humas. Jadi kita hanya memberikan materi untuk promosi itu. kita juga ada instagram namanya *disparbud_kab.banggailaut*”

Ibu ibu Tri Megawati :

“Sebelumnya Kita ada *website*, ada sosial media juga untuk menyesuaikan kebutuhan pasar. Namun di tahun 2019 ini, sesuai dengan petunjuk Bupati lebih dipersentral melalui Dinas Infokom atau di bagian humas.”

Kegiatan ini dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi saat ini. Hal ini kemudian diaplikasikan dengan pembuatan laman situs internet (*website*) tentang info pariwisata Kabupaten Banggai Laut. Namun mulai tahun 2019, untuk *website* di pusatkan di bagian Dinas Infokom atau humas. Sehingga pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Laut hanya memberikan materi promosinya saja.

Ibu Yulina D.Darkay mengatakan :

“Kemudian pembuatan materi seperti brosur, *booklet*, *city map*, buku paket wisata, *travel guide*, dan lai-lain, seperti yang sudah saya berikan itu.”

Selain itu juga dibuat info pariwisata berbentuk brosur,

booklet, city map, buku paket wisata, travel guide, dll. Sehingga wisatawan yang mengunjungi Kabupaten Banggai Laut tidak kebingungan menentukan destinasi pariwisata yang akan dituju.

b) Pelatihan pemandu wisata terpadu

Ibu Dewi Nurjannah Burhanudin mengatakan:

“Kegiatan ke empat yaitu pelatihan *guide* (pemandu wisata). Namun saat ini masih pembinaan itu masih dalam tahap awal.”

Ibu Rasmina Salotan menambahkan :

“Kegiatan pelatihan pemandu wisata terpadu itu seperti pelatihan pemandu wisata atau *guide* dan juga pembinaan kelompok sadar wisata (pokdarwis).”

Ibu ibu Tri Megawati :

“Pelatihan pemandu wisata itu untuk para *guide* profesional. Setiap biro perjalanan kan pasti punya *guide*. Dan sebagian itu ada yang sudah punya lisensi, ada yang belum. Nah pelatihan *guide* itu untuk meningkatkan kompetensi para *guide* yang di dukung dengan penerbitan lisensi. Dan kadang ada *guide* baru juga kita tambah disitu”

Kegiatan pelatihan *guide* dilakukan untuk mempersiapkan pemandu wisata yang handal. Sehingga dapat mempromosikan pariwisata di Kabupaten Banggai Laut dalam kegiatan promosi nusantara maupun mancanegara. Selain pelatihan *guide*, juga dilakukan pembentukan kelompok sadar wisata (pokdarwis).

Ibu Dewi Nurjannah Burhanudin mengatakan:

“Disini kita juga mempunyai kewajiban untuk membina masyarakat dalam bentuk pokdarwis (kelompok sadar wisata) untuk masyarakat yang di desanya mempunyai potensi wisata minimal masyarakat sadar dengan sapta pesona. Tahun ini sudah membentuk pokdarwis sejumlah 7 kelompok.”

Ibu Yulina D.Darkay mengatakan :

“Pokdarwis itu kan memberdayakan masyarakat disana sehingga bisa menjaga potensi wisata yang berbasis kelestarian lingkungan. Karena kan di Banggai, umumnya di Indonesia kan alamnya yang bagus.”

Pembinaan kelompok sadar wisata ini diharapkan akan menambah kesadaran masyarakat akan potensi-potensi pariwisata di daerahnya masing-masing, menjaga potensi wisata serta minimal memahami tentang sapta pesona. Sehingga pengelolaan dan pelayanan di objek wisata semakin baik.

- c) Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri.

Ibu Dewi Nurjannah Burhanudin mengatakan :

“Dan kegiatan ke tiga yaitu pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan mancanegara di luar negeri ini pekerjaannya mengadakan pameran dan tahun ini kami sudah mengikuti pameran yang ada di Jakarta (GWBN). Untuk di Jakarta untuk menjaring pasar nusantara karena yang menghadiri adalah *buyer* dari seluruh Indonesia sedangkan yang di Bali untuk menjaring pasar asing karena yang menghadiri *buyer* asing.

Ibu Yulina D.Darkay menabahkan :

“Mempromosikan pariwisata di pameran yang ada di Jakarta dan di Bali.

Kegiatan promosi pariwisata dilakukan untuk menjaring wisatawan baik nusantara maupun mancanegara. Dalam hal ini, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Laut

mengikuti kegiatan promosi di Jakarta bertajuk Gebyar Wisata Dan Budaya Nusantara (GWBN).

d. Melakukan Kerjasama Dengan Lembaga Kepariwisata

Strategi melakukan kerjasama pariwisata dilakukan untuk melancarkan kegiatan kepariwisataan. Karena kelancaran pengembangan kepariwisataan tidak bisa lepas dari kontribusi lembaga kepariwisataan. Dalam hal ini, strategi dikemas satu paket dengan strategi promosi pariwisata.

Strategi tersebut kemudian dimasukan dan diaplikasikan sebagai rencana program dan kegiatan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Laut yang tertuang dalam rencana strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Laut. Program tersebut yaitu:

1) Pengembangan pemasaran pariwisata

Dari program tersebut kemudian menghasilkan Kegiatan-kegiatan, antara lain:

a) Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata.

Kegiatan koordinasi dengan sektor pariwisata ini dilakukan dengan cara wisata pengenalan atau *familiarization trip* (Fam Trip) dengan biro perjalanan.

Ibu Dewi Nurjannah Burhanudin mengatakan :

“Kegiatan yang ke dua koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata. Nah bentuk pengerjaannya kita mendatangkan biro perjalanan yang kemudian melakukan Fam Trip kemudian kita mengadakan MOU disana sehingga nantinya tamunya yang lintas daerah dapat disinggahkan ke pariwisata Banggai Laut. kemudian dalam bentuk Fam Trip dengan biro perjalanan wisata kemudian mengadakan fam trip dengan jurnalis kemudian Fam Trip dengan blogger dan komunitas media sosial ini belum dipekerjakan, rencana bulan Juli sampai Agustus ini.”

Ibu Yulina D.Darkay menabahkan :

“Fam Trip ini kan nanti tujuannya untuk mengenalkan destinasi wisata pantai Kita. Jadi biro-biro dari luar itu yang membawa konsumen atau wisatawan itu bisa menjual pariwisata yang ada di Kabupaten Banggai Laut.”

Dengan melakukan Fam Trip tersebut kemudian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Laut melakukannota kesepahaman atau *memorandum of understanding* (MOU) dengan biro perjalanan sehingga nantinya wisatawan dapat disinggahkan ke objek wisata di Kabupaten Banggai Laut.

Selain itu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Laut juga melakukan Fam Trip dengan jurnalis agar para jurnalis dapat memperkenalkan pariwisata di Kabupaten Banggai Laut melalui berita atau tulisan. Kemudian dengan para blogger, hal ini juga bertujuan para blogger bisa mempromosikan pariwisata di Kabupaten Banggai Laut lewat blognya. Dan yang terakhir dengan komunitas media sosial agar para pengguna bisa mempromosikan pariwisata di Kabupaten Banggai Laut melalui media sosial.

2. Kontribusi Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kabupaten Banggai Laut

Sektor pariwisata berkontribusi terhadap PAD di Kabupaten Banggai Laut banyak dihasilkan dari pajak hotel dan restoran. Dalam pajak hotel dan restoran diambil 10% dari total penghasilan perbulan kepada Dinas Pendapatan.

Ibu Yulina D.Darkay mengatakan:

“Jadi Kita di tahun 2021 kemarin tembus 3 milyar ini di tahun 2022 mungkin sekarang sudah tembus 4 milyar, itupun titik pendapatannya dari sektor pajak hotel dan restoran. Jadi semua hotel restoran itu membayar pajaknya 10% dari total penghasilan perbulan itu ke Dinas Pendapatan. Selain itu, ada juga retribusi parkir, penginapan, tempat rekreasi dan juga pajak hiburan.”

Ibu Dewi Nurjannah Burhanudin menambahkan:

“Sektor pariwisata itu menyumbang ke PAD dari pajak dan retribusinya. Ada pajak hotel, ada pajak restoran, ada pajak hiburan, ada retribusi parkir. Namun untuk laporan keuangan, artinya berapa yang mereka setor itu kalau di Dinas Pariwisata ini hanya mengetahui dari UPTD saja. Selebihnya ada di Dinas Pendapatan Daerah.”

Secara terperinci, sektor pariwisata berkontribusi terhadap PAD dari beberapa pos, yaitu:

- a. Pajak hotel
- b. Pajak restoran
- c. Pajak hiburan
- d. Retribusi tempat khusus parkir

Untuk lebih lengkapnya, berikut data kontribusi sektor pariwisata Kabupaten Banggai Laut di tahun 2022, yaitu:

Tabel 4.2
Kontribusi Ekonomi Sektor Pariwisata di Kabupaten Banggai Laut
Tahun 2022 (Rp)

No	Sektor Pendapatan	Jumlah
1	Pajak Hotel	172.795.293
	- Hotel Banggai	168.161.284
	- Hotel Carabela	120.451.312
	- Hotel Nadela	79.803.280
	- Penginapan	
Jumlah		541.211.169
2	Pajak Restoran	90.732.179
	- Restoran	73.855.702
	- Rumah Makan	64.408.916
	- Cafe	44.700.072
	- Catering	
Jumlah		273.696.869
3	Pajak Hiburan	108.332.500
	- Pagelaran Kesenian/ Musik/ Tari	81.445.146
	- Karaoke	117.491.500
	- Pertandingan Olah Raga	
Jumlah		307.269.146
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	36.871.000
	- Bongo	32.243.000
	- Pasir Putih	39.072.000
	- Lambangan Pauno	27.625.000
	- Oyama	
Jumlah		135.811.000
Jumlah Total		1.257.988.184

Sumber: Dokumentasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Laut

Kontribusi sektor pariwisata di Kabupaten Banggai Laut pada tahun 2022 mencapai Rp27.249.926.270,89. Jumlah ini didominasi oleh pajak hotel restoran, dimana masing-masing pos tersebut menyumbang lebih banyak diantara pos yang lain.

Tabel 4.3
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah
(PAD) di Kabupaten Banggai Laut 3 Tahun Terakhir (RP)

No	Tahun	Pendapatan Sektor Pariwisata	Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi (%)
----	-------	------------------------------	------------------------	----------------

1	2020	836.000.000,00	19.200.105.433,29	4,35%
2	2021	971.896.000,00	25.519.394.841,93	3,80%
3	2022	1.257.988.184,00	27.249.926.270,89	4,68%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Laut (diolah)

Kontribusi sektor pariwisata mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Tercatat kontribusi tertinggi diperoleh pada tahun 2022 sebesar 4,68%. Sedangkan kontribusi terendah diperoleh pada tahun 2021 yaitu sebesar 3,80%. Artinya, meskipun pendapatan sektor pariwisata meningkat setiap tahunnya namun kontribusi terhadap PAD tidak selalu meningkat atau mengalami fluktuasi. Hal ini dikarenakan kenaikan pendapatan sektor lain yang signifikan tidak diikuti oleh kenaikan pendapatan sektor pariwisata.

C. Pembahasan Temuan

1. Strategi Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Banggai Laut

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Bab IV Pasal 7, disebutkan bahwa pembangunan pariwisata meliputi:

- a. Industri pariwisata
- b. Destinasi pariwisata
- c. Pemasaran
- d. Kelembagaan kepariwisataan

Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Laut melaksanakan tugas khusus dalam hal pengembangan dan pembangunan pariwisata di Kabupaten Banggai Laut. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pariwisata di Kabupaten Banggai Laut. sehingga nantinya akan menambah jumlah kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara.

Dari hasil penyajian data dan analisis yang sudah peneliti paparkan, strategi pengembangan pariwisata yang digagas oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Laut, antara lain:

a. Melakukan koordinasi dengan pelaku usaha pariwisata

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Laut menggagas strategi pengembangan pariwisata, yaitu dengan melakukan koordinasi dengan pelaku usaha pariwisata. Strategi tersebut kemudian dimasukan dan diaplikasikan sebagai rencana program dan kegiatan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Laut yang tertuang dalam rencana strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Banggai Laut. Program tersebut yaitu:

1) Pengembangan kemitraan

Dari program tersebut kemudian menghasilkan Kegiatan-kegiatan, antara lain:

- a) Pengembangan dan penguatan informasi *data base*.
- b) Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya.
- c) Pengembangan SDM dan profesionalisme bidang pariwisata.
- d) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata.
- e) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Industri pariwisata menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yaitu usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan

penyelenggaraan pariwisata.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pembangunan industri pariwisata, antara lain pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Dari paparan diatas, maka dapat dikatakan bahwa strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Banggai Laut yang digagas oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Laut dalam hal industri pariwisata yaitu melakukan koordinasi dengan pelaku usaha pariwisata sudah sesuai dengan teori tentang industri pariwisata.

b. Melakukan pengembangan destinasi pariwisata

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Laut menggagas strategi pengembangan pariwisata, yaitu dengan melakukan pengembangan destinasi pariwisata. Strategi tersebut kemudian dimasukan dan diaplikasikan sebagai rencana program dan kegiatan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Laut yang tertuang dalam rencana strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Laut. Program tersebut yaitu:

1) Pengembangan destinasi pariwisata

Dari program tersebut kemudian menghasilkan Kegiatan-kegiatan, antara lain:

a) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata.

b) Pengembangan daerah tujuan wisata.

Destinasi pariwisata menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yaitu kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pembangunan destinasi pariwisata, antara lain pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Dari paparan diatas, maka dapat dikatakan bahwa strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Banggai Laut yang digagas oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Laut dalam hal destinasi pariwisata yaitu melakukan pengembangan destinasi pariwisata sudah sesuai dengan teori tentang destinasi pariwisata.

c. Melakukan pemasaran pariwisata

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Laut menggagas strategi pengembangan pariwisata, yaitu dengan melakukan pemasaran pariwisata. Strategi tersebut kemudian dimasukan dan diaplikasikan sebagai rencana program dan kegiatan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Laut yang tertuang dalam rencana strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Banggai Laut. Program tersebut yaitu:

1) Pengembangan pemasaran pariwisata

Dari program tersebut kemudian menghasilkan Kegiatan-kegiatan, antara lain:

- a) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata.
- b) Pelatihan pemandu wisata terpadu.

Pemasaran pariwisata adalah seluruh kegiatan untuk mempertemukan permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*), sehingga pembeli mendapat kepuasan dan penjual mendapat keuntungan maksimal dengan risiko seminimal mungkin.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasanya pemasaran pariwisata adalah kegiatan yang menunjang pengetahuan wisatawan terhadap objek wisata. Sehingga kemudian pihak objek wisata bisa mendapat keuntungan dari adanya kunjungan wisatawan tersebut.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan pembangunan pemasaran, antara lain pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

Dari paparan diatas, maka dapat dikatakan bahwa strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Banggai Laut yang digagas oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Laut dalam hal pemasaran pariwisata yaitu melakukan pemasaran pariwisata sudah

sesuai dengan teori pemasaran pariwisata.

d. Melakukan kerjasama dengan lembaga kepariwisataan

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Laut mengagas strategi pengembangan pariwisata, yaitu dengan melakukan kerjasama dengan lembaga kepariwisataan. Strategi tersebut kemudian dimasukkan dan diaplikasikan sebagai rencana program dan kegiatan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Laut yang tertuang dalam rencana strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Laut. Program tersebut yaitu:

1) pengembangan pemasaran pariwisata

Dari program tersebut kemudian menghasilkan Kegiatan-kegiatan, antara lain:

- a) Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata.
- b) Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata.
 1. Lembaga pemerintahan
 2. Lembaga usaha pariwisata
 3. Lembaga promosi pariwisata

Kelembagaan kepariwisataan adalah keseluruhan institusi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, swasta dan masyarakat, sumberdaya manusia, mekanisme operasional serta regulasi yang terkait dengan kepariwisataan.

Dari paparan diatas, maka dapat dikatakan bahwa strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Banggai Laut yang digagas oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Laut

dalam hal kelembagaan kepariwisataan yaitu melakukan kerjasama dengan lembaga kepariwisataan sudah sesuai dengan teori kelembagaan pariwisata yang tercantum dalam teori.

2. Kontribusi Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banggai Laut.

Kenaikan pendapatan di sektor pariwisata setiap tahunnya tidak menjamin kenaikan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD. Hal ini dikarenakan kenaikan sektor lain yang signifikan tidak diimbangi oleh kenaikan pendapatan sektor pariwisata.

Tabel 4.4

Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD di Kabupaten Banggai Laut 3 Tahun 2020 - 2022 (RP)

No	Tahun	Pendapatan Sektor Pariwisata	Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi (%)
1	2020	836.000.000,00	19.200.105.433,29	4,35%
2	2021	971.896.000,00	25.519.394.841,93	3,80%
3	2022	1.257.988.184,00	27.249.926.270,89	4,68%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Laut (diolah)

Di Kabupaten Banggai Laut, kontribusi pariwisata terhadap PAD hanya berkisar di angka 3-4%. Namun, apabila dibandingkan dengan kontribusi pariwisata terhadap PAD di kabupaten lain, kontribusi pariwisata terhadap PAD di Kabupaten Banggai Laut justru lebih baik. Misalnya dengan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Tabel 4.5

Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020-2022

No	Tahun	Kontribusi (%)
1	2020	1,28
2	2021	1,05
3	2022	1,59

Sumber: BPS Kabupaten Banggai Kepulauan (diolah)

Di Kabupaten Banggai Kepulauan, kontribusi pariwisata terhadap PAD juga mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Mulai dari tahun 2020 – 2022, kontribusi pariwisata terhadap PAD di Kabupaten Banggai Kepulauan hanya berkisar di angka 1%.

Di Kabupaten Banggai Laut, sektor yang memberikan kontribusi terhadap PAD yang berasal dari sektor pariwisata berasal dari dua pos yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Secara terperinci, sektor-sektor tersebut yaitu:

- a. Pajak hotel
- b. Pajak restoran
- c. Pajak hiburan
- d. Retribusi tempat khusus parkir

PAD adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. Adapun unsur dari PAD adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Dari paparan di atas, maka dapat dikatakan bahwa pos-pos pariwisata yang berkontribusi kepada PAD sesuai dengan teori tentang PAD yaitu pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai strategi pengembangan pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Banggai Laut, kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Banggai Laut, yaitu:
 - a. Melakukan koordinasi dengan pelaku usaha pariwisata.
 - b. Melakukan pengembangan destinasi pariwisata.
 - c. Melakukan pemasaran pariwisata.
 - d. Melakukan kerjasama dengan lembaga kepariwisataan.
2. Kontribusi sektor pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui beberapa pos, yaitu:
 - a. Pajak hotel
 - b. Pajak restoran
 - c. Pajak hiburan
 - d. Retribusi tempat khusus parkir

B. Saran

Peneliti memberikan saran yang ditujukan untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banggai laut agar lebih baik dalam menjalankan program dan kegiatan pengembangan pariwisata di Kabupaten Banggai Laut. saran dari peneliti sebagai berikut:

1. Lebih memaksimalkan lagi koordinasi dengan pelaku usaha pariwisata agar pelaku usaha pariwisata dapat melaksanakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Banggai Laut dengan meningkatkan fasilitas, pelayanan di objek wisata.
2. Lebih meningkatkan pembangunan fasilitas di objek wisata UPT dan bantuan di objek wisata milik swasta dengan menggandeng investor baik lokal maupun asing, sehingga pembangunan menjadi lebih maksimal.
3. Lebih memaksimalkan pemasaran yang dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi serta pembaharuan model pemasaran dengan mengikuti perkembangan zaman.
4. Lebih meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga kepariwisataan baik pemerintah, swasta serta promosi agar segmen-segmen pengembangan dan pembangunan pariwisata di Kabupaten Banggai Laut lebih efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade, I. (2021). *Strategi Pengembangan Objek Wisata Dalam Upaya Meningkatkan Kunjungan Wisatawan (Studi Pada Objek Wisata Mantar)*. Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Babo, J. P. (2016). Peranan Dinas Pariwisata Dan Ekoknemi Kreatif Dalam Mengelola Wisata Pantai Kabupaten Banggai Laut. *Jurnal Eksekutif*, 1(7).
- Bahiyah, C., Riyanto, W. H., & Sudarti, S. (2018). Strategi Pengembangan Potensi Pariwisata Di Pantai Duta Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(1), 95–103.
- Dartiningsih, B. E. (2021). *Komunikasi Pariwisata: Tinjauan Praktik Pariwisata Syariah Di Madura*. Penerbit Adab.
- Halimu, M. M. (2022). *Strategi Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Banggai Laut*. Universitas Islam Malang.
- Kurniawan, B. T. (2019). Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Akibat Pengembangan Lingkar Wilis Di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Agribis*, 5(1), 55–85.
- Mappa, Y. (2022). *Studi Pengembangan Objek Wisata Danau (Studi Kasus: Danau Tendung Di Kabupaten Banggai Kepulauan)*. Universitas Bosowa.
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 12, 145-151.
- Nafi'ah A'mada, Nafi'ah A'mada (2019) *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Tahun 2011-2016 (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Malang)*. Bachelor Thesis, Universitas Islam Majapahit Mojokerto.
- Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30–45.
- Prasetya, M. N. (2018). Membangun Kembali Budaya Maritim Indonesia: Melalui Romantisme Negara (Pemerintah) Dan Civil Society. *Jurnal PIR: Power In International Relations*, 1(2), 176–187.
- Sa'idah, A. N. (2017). *Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung (Studi Pada Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung)*. UIN Raden Intan Lampung.

- Setya Nugraha, A. (2017). *Aktivitas Komunikasi Organisasi Oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Magetan Dalam Pengelolaan Obyek Wisata Telaga Sarangan Kabupaten Magetan*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Sunarso, H. S., & SH, M. H. (2023). *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Thalib, M. A. (2022, Mei). Pelatihan Desain Riset Akuntansi Budaya Menggunakan Metode Kualitatif. *Komunaljurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 7-14.







DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana strategi pengembangan objek wisata pantai di Kabupaten Banggai Laut dalam hal industri pariwisata?
2. Bagaimana perwujudannya dalam sebuah kegiatan?
3. Bagaimana strategi pengembangan objek wisata pantai di Kabupaten Banggai Laut dalam hal destinasi pariwisata?
4. Bagaimana perwujudannya dalam sebuah kegiatan?
5. Bagaimana strategi pengembangan objek wisata pantai di Kabupaten Banggai Laut dalam hal promosi pariwisata?
6. Bagaimana perwujudannya dalam sebuah kegiatan?
7. Bagaimana strategi pengembangan objek wisata pantai di Kabupaten Banggai Laut dalam hal kelembagaan kepariwisataan?
8. Bagaimana perwujudannya dalam sebuah kegiatan?
9. Bagaimana Kontribusi Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai Laut?



Tampak Depan Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Laut



Wawancara dengan ibu Dewi Nurjannah Burhanudin, ST



Wawancara dengan ibu Rasmina Salotan, SH



Wawancara dengan ibu Tri Megawati, S.Sos



Wawancara dengan ibu Irnawati Dj Londa. S.Sos



Wawancara dengan ibu Yulina D.Darkay,SH., M.A.P. S.Sos